



PEMERINTAH PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR
DI JAKARTA

2024
-
2026

RENSTRA BADAN PENGHUBUNG

RENCANA STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH





GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 27 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
TAHUN 2024-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Gubernur Nomor 16 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026, maka perlu dijabarkan ke dalam rencana operasional sesuai urusan daerah ke dalam dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah;
- b. bahwa sesuai dengan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah setelah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6781);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
11. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021 Nomor 1);
12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008 Nomor 15);
13. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023-2042 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 11);
14. Peraturam Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor 76 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pemabangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 Nomor 78);
15. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 16 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2024-2026.

Pasal 1

Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026 selanjutnya disebut Renstra PD memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026.

Pasal 2

- (1) Renstra PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas :
- BAB I. Pendahuluan;
 - BAB II. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah;
 - BAB III. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah;
 - BAB IV. Tujuan dan Sasaran;
 - BAB V. Strategi dan Arah Kebijakan;
 - BAB VI. Rencana Program, Kegiatan dan Subkegiatan
 - BAB VII. serta Pendanaan;
 - BAB VIII. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan;
 - Penutup.
- (2) Renstra PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 3

Renstra PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri atas Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sebagai berikut:

- a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- b. Dinas Kesehatan;
- c. RSUD A. Wahab Syahrani di Samarinda;
- d. RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo di Balikpapan;
- e. Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam;
- f. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat;
- g. Satuan Polisi Pamong Praja;
- h. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- i. Dinas Sosial;
- j. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;

- k. Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- l. Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura;
- m. Dinas Lingkungan Hidup;
- n. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
- o. Dinas Perhubungan;
- p. Dinas Komunikasi dan Informatika;
- q. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
- r. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- s. Dinas Pemuda dan Olah Raga;
- t. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah;
- u. Dinas Kelautan Dan Perikanan;
- v. Dinas Pariwisata;
- w. Dinas Perkebunan;
- x. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- y. Dinas Kehutanan;
- z. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral;
- aa. Sekretariat Daerah;
- bb. Sekretariat DPRD;
- cc. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- dd. Badan Pendapatan Daerah;
- ee. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- ff. Badan Kepegawaian Daerah;
- gg. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- hh. Badan Penelitian dan Pengembangan;
- ii. Badan Penghubung Provinsi;
- jj. Inspektorat;
- kk. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Pasal 4

Renstra PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, telah sesuai dengan:

- a. sistematika dan substansi penulisan Rencana Strategis Perangkat Daerah; dan
- b. rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026.

Pasal 5

Renstra PD selanjutnya menjadi:

- a. pedoman Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah; dan

- b. bahan untuk Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Pasal 6

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 14 Juli 2023

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

ISRAN NOOR

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 14 Juli 2023

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

ttd

SRI WAHYUNI

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2023 NOMOR 27.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,
SEKRETARIAT DAERAH
3
SUPARMI
NIP. 19690512 198903 2 009



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, Karena berkat rahmat dan karunia-Nya jualah kami dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026.

Renstra Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026 kami buat sebagai wujud pertanggungjawaban lembaga pemerintah kepada pihak yang memberi mandat/amanah terutama terhadap hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan penyusunan rencana program, kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Timur sebagai panduan/acuan untuk 3 (tiga) tahun kedepan dan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja, Rencana Kinerja Tahunan sampai ke Penetapan Kinerja setiap tahunnya.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Renstra ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu kritik dan saran membangun sangat kami harapkan untuk perbaikan dan penyempurnaan di masa yang akan datang.

Semoga Renstra ini dapat dimanfaatkan sebagai salah satu media komunikasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam mengawasi pencapaian kinerja Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Timur.

KEPALA BADAN



Raihan Fida Nuzband S.Hut
Pembina
NIP. 19740704 200701 1 030

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR GAMBAR	v
DAFTAR TABEL	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan	1
1.3. Maksud dan Tujuan	3
1.4. Sistematika Penulisan	3
BAB II GAMBARAN PELAYANAN BADAN PENGHUBUNG PROVINSI KALIMANTAN TIMUR	6
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Timur	6
2.2. Sumber Daya Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Timur	8
2.3. Kinerja Pelayanan Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Timur	10
2.4. Kelompok Sasaran Layanan	20
2.5. Mitra Badan Penghubung dalam Pemberian Pelayanan	22
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS BADAN PENGHUBUNG PROVINSI KALIMANTAN TIMUR	23
3.1. Permasalahan Pelayanan Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Timur	23
3.2. Isu Strategis	27
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	29
4.1. Tujuan dan Sasaran RENSTRA Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026	29

4.2.	Cascading Kinerja Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Timur	33
BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	37
BAB VI	RENCANA PROGRAM, KEGIATAN dan SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN	42
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	52
BAB VIII	PENUTUP	54
	LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR GAMBAR

2.1	Struktur Organisasi Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Timur	8
4.1	Cascading Permasalahan dan Arah Kebijakan Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026.....	33
4.2	Pohon Kinerja Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026	34
4.3	Cascading Kinerja Badan Penghubung Prov. Kaltim Tahun 2024-2026	35

DAFTAR TABEL

2.1	Keadaan Pegawai per 31 Desember 2022	9
2.2	Keadaan PNS Berdasarkan Golongan per 31 Desember 2022.....	9
2.3	Aset Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Timur	10
2.4	Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Timur RENSTRA 2019-2023	12
2.5	Anggaran dan Realisasi Keuangan Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Timur RENSTRA 2019-2023	19
2.6	Alokasi Anggaran Belanja Periode Tahun Anggaran 2019-2023	20
2.7	Jenis Pelayanan dan Kelompok Sasaran	21
4.1	Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja Badan Penghubung Prov. Kaltim Tahun 2024-2026.....	31
5.1	Penentuan Strategi Badan Penghubung Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Di Jakarta	39
5.2	Tujuan, Sasaran, Strategis, Kebijakan dan Program/Kegiatan Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026...	39
6.1	Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun Periode 2024-2026.....	46
6.2	Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Indikator Kinerja dan Pendanaan Badan Penghubung Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur	47
7.1	Indikator Kinerja OPD Yang Mengacu Kepada Tujuan dan Sasaran RPD	52

BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah dalam perjalanannya terus disempurnakan, terakhir dilakukan dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2007. Gubernur sebagai Kepala Daerah Provinsi melakukan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah provinsi yang meliputi, pengendalian terhadap perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah, pelaksanaan rencana pembangunan daerah dan evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan daerah, termasuk didalamnya Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah serta sesuai dengan amanat Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru.

Penyusunan RPD dan RENSTRA Perangkat Daerah mempedomani sistematika, substansi, tahapan dan tata cara sebagaimana yang diatur di dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 52 Tahun 2022.

Mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD), maka Rencana Strategis (Renstra) menetapkan sasaran-sasaran yang akan dicapai dengan indikator keberhasilan yang dapat diukur dan diverifikasi, sehingga dapat dijadikan acuan dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah dalam jangka waktu tiga tahun. Gubernur bertanggung jawab terhadap pencapaian tujuan dan sasaran RPD, sedangkan Kepala Perangkat Daerah bertanggung jawab terhadap tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah.

Dalam menyusun Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024 - 2026 tersebut dilakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan Bappeda, pemangku kepentingan dan instansi terkait lainnya.

2. Dasar Hukum Penyusunan

Peraturan perundang-undangan yang mendasari penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024–2026, adalah sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Nomor. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
- 2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
- 3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Tahun 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58; Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
- 4) Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
- 6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- 8) Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru;

- 9) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 9 Tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur; dan
- 10) Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 82 Tahun 2016, tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Timur.
- 11) Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 16 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026.

3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Strategis ini adalah sebagai pedoman untuk pelaksanaan program/kegiatan selama kurun waktu 3 (tiga) tahun sehingga dapat dijadikan dasar perencanaan tahunan yang menjadi pedoman dalam penyusunan Renja yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) Badan Penghubung Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur serta dijadikan panduan untuk evaluasi pelaksanaan program/kegiatan.

Sedang tujuan disusunnya Rencana Strategis Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Timur adalah merumuskan kebijakan guna mendukung pencapaian visi dan misi kepala daerah yang tertuang dalam RPD Provinsi Kalimantan Timur 2024-2026 dan juga memasukkan program/kegiatan yang ada di Rencana Kerja (RENJA) ke dalam Kebijakan Umum Anggaran Prioritas dan Plafon Anggaran (KUA-PAS).

4. Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 – 2026, disusun dalam sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Bab I Pendahuluan paling sedikit memuat:

1. Latar Belakang
2. Dasar Hukum Penyusunan
3. Maksud dan Tujuan
4. Sistematika Penulisan

BAB II Gambaran Pelayanan Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Timur

Bab II memuat:

1. Tugas, Fungsi dan Struktur Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Timur
2. Sumber Daya Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Timur
3. Kinerja Pelayanan Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Timur
4. Kelompok Sasaran Layanan
5. Mitra Badan Penghubung Pemberian Pelayanan

BAB III Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Timur

Bab III memuat:

1. Permasalahan Pelayanan Badan Penghubung Kalimantan Timur
2. Isu Strategis

BAB IV Tujuan dan Sasaran

Bab IV memuat:

1. Tujuan dan Sasaran RENSTRA Badan Penghubung Tahun 2024-2026
2. Cascading Kinerja Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Timur

BAB V Strategi dan Arah Kebijakan

Bab V memuat strategi dan arah kebijakan PD dalam mencapai tujuan dan sasaran RENSTRA PD Tahun 2024-2026

BAB VI Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan

Bab VI menguraikan program, kegiatan, subkegiatan beserta kinerja, indikator, target dan pagunya

BAB VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab VII memuat:

1. Penentuan target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran RENSTRA PD tahun 2024-2026 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) PD

2. Penentuan target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2024-2026 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK). IKK beserta targetnya dikhususkan bagi PD Pemangku Urusan Pemerintah Daerah.

BAB VIII Penutup

BAB II GAMBARAN PELAYANAN BADAN PENGHUBUNG PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Timur merupakan unsur pelaksanaan tugas pemerintah Provinsi yang berkedudukan di Jakarta, bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur, dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang secara fungsional merangkap sebagai Pimpinan Anjungan Kaltim di “Taman Mini Indonesia Indah” (TMII) Jakarta dan Pimpinan Mess dalam Pengelolaan Mess.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 82 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Timur, struktur organisasi Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Timur terdiri dari :

1. Kepala Sub Bagian Tata Usaha
2. Kepala Seksi Hubungan Antar Lembaga
3. Kepala Seksi Promosi dan Informasi
4. Kepala Seksi Pelayanan

1. Tugas, Fungsi dan Struktur Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Timur

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur, Pembentukan Badan Penghubung adalah untuk menunjang koordinasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan dan Pembangunan dengan Pemerintah Pusat.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana tersebut diatas, berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 82 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Timur. Kepala Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Timur mempunyai tugas dan fungsi :

- 1) Kepala Badan mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan koordinasi pelaksanaan urusan pemerintahan dan pembangunan dengan pemerintah pusat.

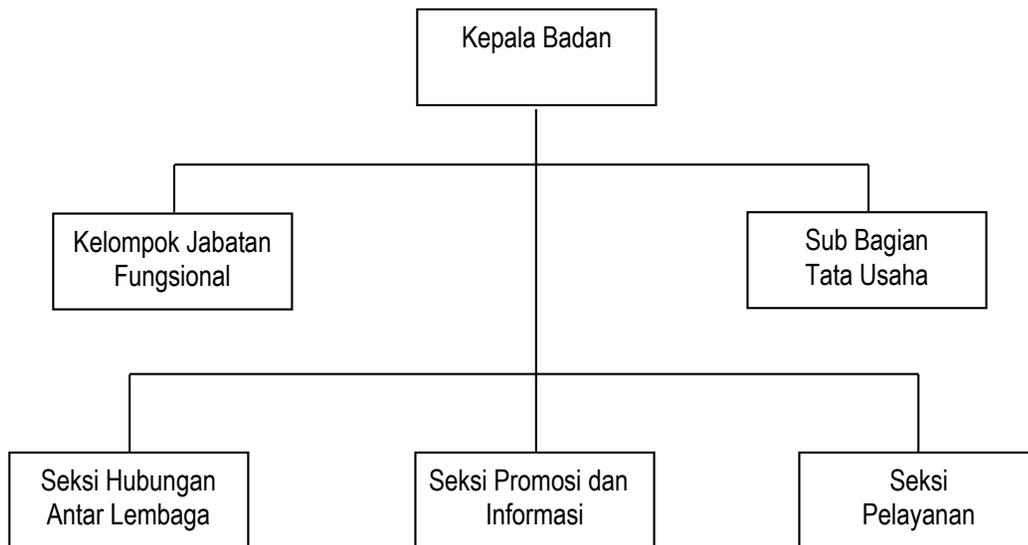
2) Kepala Badan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Kepala Badan menyelenggarakan fungsi :

- 1) Perumusan kebijakan Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Timur sesuai dengan Rencana Strategis yang telah ditetapkan Pemerintah Daerah;
- 2) Penyiapan bahan perumusan kebijakan pengembangan bidang hubungan antar lembaga, promosi dan informasi, pelayanan dan pengelolaan anjungan Kaltim serta Mess;
- 3) Penyiapan bahan koordinasi perencanaan program pengembangan hubungan antar lembaga, promosi dan informasi, pelayanan dan pengelolaan Anjungan Kaltim serta Mess;
- 4) Penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian hubungan antar lembaga;
- 5) Penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian promosi dan informasi serta pengelolaan anjungan Kaltim;
- 6) Penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian pelayanan dan pengelolaan Mess;
- 7) Melaksanakan urusan ketatausahaan;
- 8) Pembinaan kelompok jabatan fungsional; dan
- 9) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Sebagaimana tercantum dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 82 Tahun 2016, tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Timur, maka dapat digambarkan bagan struktur Organisasi Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Timur adalah sebagai berikut:

Gambar 2.1.
Struktur Organisasi Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Timur



Kepala Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Timur memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana tercantum dalam Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor 82 Tahun 2016, membawahi:

1. **Sub Bagian Tata Usaha** mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi, perencanaan program dan pelaporan, urusan umum, kehumasan, kepegawaian, ketatalaksanaan, perlengkapan dan administrasi keuangan.
2. **Seksi Hubungan Antar Lembaga** mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan dan pengendalian hubungan antar lembaga.
3. **Seksi Promosi dan Informasi** mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan, pengendalian promosi dan informasi serta pengelolaan Anjungan Kaltim.
4. **Seksi Pelayanan** mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan, pelayanan dan pengelolaan Mess.

2. Sumber Daya Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Timur

Strategis adalah suatu arah dan tindakan mengenai pernyataan yang diinginkan oleh Organisasi di waktu yang akan datang, strategis Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Timur dapat mewujudkan pelayanan yang prima dan akan menjadi acuan dalam penetapan kebijakan, program operasional dan kegiatan/aktivitas dengan memperhatikan sumber daya

yang ada serta keadaan lingkungan yang dihadapi. Adapun gambaran sumber daya yang dimiliki oleh Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Timur adalah sebagai berikut:

2.1 Sumber Daya Manusia

Badan Penghubung sampai dengan akhir bulan Desember tahun 2022 memiliki pegawai sebanyak 99 (sembilan puluh sembilan) orang, terdiri dari 22 (dua puluh dua) PNS dan 77 (tujuh puluh tujuh) pegawai non PNS/kontrak, baik yang berada di Badan Penghubung, Mess dan Anjungan Kaltim TMII.

Dengan rincian pegawai laki-laki sebanyak 68 (enam puluh delapan) orang dan pegawai perempuan sebanyak 31 (tiga puluh satu) orang. Dengan tingkat pendidikan; SD sebanyak 4 (empat) orang, SLTP sebanyak 5 (lima) orang, SLTA sebanyak 61 (enam puluh satu) orang, D3 sebanyak 12 (dua belas) orang, S1 sebanyak 15 (lima belas) orang, dan S2 sebanyak 2 (dua) orang. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.1.
Keadaan Pegawai per 31 Desember 2022

STATUS PEGAWAI		GENDER		PENDIDIKAN						JML
PNS	NON PNS	L	P	SD	SLTP	SLTA	D3	S1	S2	
22	77	68	31	4	5	61	12	15	2	99

Tabel 2.2.
Keadaan PNS berdasarkan Golongan per 31 Desember 2022

NO.	JABATAN	GOLONGAN				ESELON		
		I	II	III	IV	III	IV	V
1	KEPALA BADAN	-	-	1	-	1	-	-
2	KASUBBAG. TATA USAHA DAN STAF	-	1	7	-	-	1	-
3	KASI. HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA DAN STAF	-	-	3	-	-	1	-
4	KASI. PROMOSI DAN INFORMASI DAN STAF	1	2	2	-	-	1	-
5	KASI. PELAYANAN DAN STAF	-	3	2	-	-	1	-
	JUMLAH	1	6	15	-	1	4	-

2.2 Sarana dan Prasarana Kantor

Untuk menunjang kegiatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Badan Penghubung dilengkapi dengan sarana dan prasarana berupa aktiva tetap seperti tanah, bangunan kantor, dan aktiva bergerak seperti kendaraan dinas, barang-barang inventaris dan fasilitas lainnya.

Sarana dan prasarana tersebut sebagian dalam kondisi baik dan sebagian dalam kondisi cukup baik, dan sampai dengan tahun 2022 telah diupayakan peningkatan sarana dan prasarana Badan Penghubung yaitu dengan melakukan pembelian/pengadaan barang dan pemeliharaan sarana dan prasarana kantor.

Adapun data-data aset yang dimiliki Badan Penghubung serta pembelian/pengadaan barang dan pemeliharaan sarana dan prasarana kantor sampai dengan tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3.
Aset Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Timur

No.	Aset Kantor	Jumlah	Kondisi
1.	Tanah Kantor jalan Kramat II No.42	930 m ²	Baik
2.	Bangunan Kantor jalan Kramat II No.42	900 m ²	Baik
3.	Tanah Kantor jalan Kramat II No.34	662 m ²	Baik
4.	Bangunan Kantor jalan Kramat II No.34	400 m ²	Baik
5.	Tanah Rumah Dinas	332 m ²	Baik
6.	Bangunan Rumah Dinas	170,61 m ²	Baik
7.	Bangunan Anjungan Kaltim TMII	7 unit	Baik
8.	Kendaraan Roda Empat	20 unit	Baik
9.	Kendaraan Roda Dua	14 unit	Baik
10.	Inventaris Kantor		Baik

3. Kinerja Pelayanan Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Timur

Pengukuran Kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dari kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya dalam rangka mewujudkan VISI dan MISI instansi pemerintah. Pengukuran dimaksud merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator. Penilaian tersebut tidak terlepas dari proses yang merupakan kegiatan mengolah masukan menjadi keluaran atau penilaian dalam proses

penyusunan kebijakan/program/kegiatan yang dianggap penting dan berpengaruh terhadap pencapaian sasaran dan tujuan.

Pengukuran kinerja dapat dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja utama, pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja yang lazimnya dapat diperoleh melalui 2 (dua) sumber, yaitu : (1). sumber internal, berasal dari sistem informasi yang diterapkan pada instansi, dan (2) sumber eksternal, berasal dari luar instansi baik data primer maupun data sekunder. Berikut ini revidu kinerja Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan Renstra periode 2019-2023.

Tabel 2.4.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Timur
Renstra 2019-2023

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target RPJMD/Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Tingkat/Rasio Capaian pada Tahun Ke-					Interpretasi 2023 belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)	
		2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023 TW1	2019	2.020	2021	2022	2023 TW1		
1	2	3					4					5					6	
1.	Indikator Tujuan																	
1.1	Persentase pelayanan Badan Penghubung yang dapat terlaksana dengan baik	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			100%	100%	100%				
1.2	Persentase SDM yang memiliki standar kompetensi	50%	50%	50%	60%	60%	55%	58%	66%			110%	116%	132%				
1.3	Nilai Akuntabilitas Kinerja			70	70	71				72,43	-					103,47%	-	<
1.4	Indeks Kepuasan Masyarakat			85	87	90				91,60	-					105,29%	-	<
2.	Indikator Sasaran																	
2.1	Tingkat kepuasan terhadap Pelayanan Badan Penghubung	80%	80%	82%	82%	85%	87,77%	90,96%	91,34%			109,71%	113,70%	111,39%				
2.2	Persentase Kompetensi ASN yang sesuai dengan Kebutuhan	79,16%	83,33%	87,5%	91,66%	95,83%	80,77%	91,30%	91,30%			102,03%	109,56%	104,34%				
2.3	Nilai Akuntabilitas Kinerja	66	66	67	68	70	66,52	67,63	71,07			100,79%	102,47%	106,07%				
2.4	Indeks Kepuasan Mitra Kerja terhadap Badan Penghubung			80	82	85				91,64	-					111,76%	-	<
2.5	Persentase Pelayanan Publik Pada Tugas Badan Penghubung Provinsi			85%	90%	95%				91,56%	-					101,73%	-	<
3.	Indikator Program																	
3.1	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)	70%	75%				87,77%	90,96%				125,39%	121,28%					
3.2	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu	1 Unit	2 Unit				1 Unit	2 Unit				100%	100%					
3.3	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi	45%	50%				55%	58%				122,22%	116,00%					

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target RPJMD/Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Tingkat/Rasio Capaian pada Tahun Ke-					Interpretasi 2023 belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
		2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023 TW1	2019	2.020	2021	2022	2023 TW1	
1	2	3					4					5					6
3.4	Nilai Akuntabilitas Kinerja PD	66	66				66,52	67,63				100,79%	102,47%				
3.5	Jumlah wisatawan/ pengunjung yang mengisi form survey kepuasan	250 Orang	250 Orang														
3.6	Tingkat kepuasan pelayanan Badan Penghubung	80%	80%	85%			87,77%	90,96%	89,59%			109,71%	113,70%	105,40%			
3.7	Persentase pelayanan publik pada tugas Badan Penghubung Provinsi			90%	92%	93%			98,76%	91,56%	-			109,73%	99,52%	-	<
3.8	Indeks Kepuasan Mitra Kerja terhadap Pelayanan Badan Penghubung			80	82	85				91,64%	-				1,12%	-	<
4	Indikator Kegiatan																
4.1	Jumlah bulan pelaksanaan administrasi perkantoran	12 Bulan	12 Bulan				12 Bulan	12 Bulan				100%	100%				
4.2	Jumlah peralatan dan kelengkapan kantor	57 Jenis	16 Jenis				57 Jenis	16 Jenis				100%	100%				
4.3	Jumlah bulan pemeliharaan peralatan dan kelengkapan sarana dan prasarana	12 Bulan	12 Bulan				12 Bulan	12 Bulan				100%	100%				
4.4	Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	85 Kegiatan	85 Kegiatan				96 Kegiatan	102 Kegiatan				112,94%	120,00%				
4.5	Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman	12 Bulan	12 Bulan				12 Bulan	12 Bulan				100%	100%				
4.6	Jumlah PNS yang mengikuti diklat/bimtek	50 Orang	50 Orang				50 Orang	50 Orang				100%	100%				
4.7	Jumlah pakaian dinas	240 Stel	240 Stel				240 Stel	240 Stel				100%	100%				
4.8	Jumlah dokumen perencanaan dan anggaran	10 Dokumen	10 Dokumen				10 Dokumen	10 Dokumen				100%	100%				
4.9	Jumlah laporan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kegiatan	4 Laporan	4 Laporan				4 Laporan	4 Laporan				100%	100%				
4.10	Jumlah laporan kegiatan promosi di Anjungan Kaltim dan TMII	90 Laporan	90 Laporan				90 Laporan	90 Laporan				100%	100%				
4.11	Jumlah laporan kegiatan promosi dalam daerah DKI Jakarta	9 Laporan	9 Laporan				9 Laporan	9 Laporan				100%	100%				
4.12	Jumlah laporan kegiatan propaganda penerangan	1 Laporan	1 Laporan				1 Laporan	1 Laporan				100%	100%				
4.13	Banyaknya pejabat daerah/pusat yang difasilitasi	75 Kali	75 Kali				62 Kali	74 Kali				82,67%	98,67%				

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target RPJMD/Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Tingkat/Rasio Capaian pada Tahun Ke-					Interpretasi 2023 belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
		2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023 TW1	2019	2.020	2021	2022	2023 TW1	
1	2	3					4					5					6
4.14	Jumlah laporan kegiatan sosial kemasyarakatan	18 Laporan	18 Laporan				18 Laporan	18 Laporan				100%	100%				
4.15	Jumlah pengunjung mess yang mengisi form survey kepuasan	600 Orang	600 Orang				581 Orang	200 Orang				96,83%	33,33%				
4.16	Jumlah dokumen administrasi keuangan yang selesai tepat waktu	1077 Dokumen	1077 Dokumen				1242 Dokumen	1235 Dokumen				115,32%	114,67%				
4.17	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			16 Dokumen	16 Dokumen	16 Dokumen			16 Dokumen	16 Dokumen	8 Dokumen			100%	100%	50%	<
4.18	Jumlah Bulan Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan			12 Bulan	12 Bulan	3 Bulan			100%	100%	25%	<
4.19	Persentase ASN Yang Memiliki Standar Kompetensi			50%	60%	60%			66%	77%	-			132,00%	128,33%	-	<
4.20	Jumlah Bulan Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah			12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan			12 Bulan	12 Bulan	3 Bulan			100%	100%	25%	<
4.21	Jumlah Unit Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			76 Unit	79 Unit	181 Unit			74 Unit	79 Unit	42 Unit			97,37%	100%	23,20%	<
4.22	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan			12 Bulan	12 Bulan	3 Bulan			100%	100%	25%	<
4.23	Jumlah Bulan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan			12 Bulan	12 Bulan	3 Bulan			100%	100%	25%	<
4.24	Jumlah Pelayanan Penghubung yang dilaksanakan			3 Kegiatan	3 Kegiatan	3 Kegiatan			3 Kegiatan	3 Kegiatan	3 Kegiatan			100%	100%	18,94%	<
5. Indikator Sub Kegiatan																	
5.1	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			9 Dokumen	9 Dokumen	9 Dokumen			9 Dokumen	9 Dokumen	4 Dokumen			100%	100%	44,44%	<
5.2	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen			1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen			100%	100%	100%	=

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target RPJMD/Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Tingkat/Rasio Capaian pada Tahun Ke-					Interpretasi 2023 belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
		2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023 TW1	2019	2.020	2021	2022	2023 TW1	
1	2	3					4					5					6
5.3	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen			1 Dokumen	1 Dokumen	-			100%	100%	-	<
5.4	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD			1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen			1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen			100%	100%	100%	=
5.5	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD			1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen			1 Dokumen	1 Dokumen	-			100%	100%	-	<
5.6	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen			3 Dokumen	3 Dokumen	2 Dokumen			100%	100%	66,67%	<
5.7	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			23 Orang/ Bulan	25 Orang/ Bulan	25 Orang/ Bulan			23 Orang/ Bulan	24 Orang/ Bulan	21 Orang/ Bulan			100%	96,00%	84,00%	=
5.8	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			49 Dokumen	61 Dokumen	61 Dokumen			49 Dokumen	61 Dokumen	15 Dokumen			100%	100%	24,59%	<
5.9	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan			2 Paket	2 Paket	2 Paket			2 Paket	2 Paket	-			100%	100%	-	<
5.10	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan			68 Orang	63 Orang	63 Orang			68 Orang	63 Orang	2 Orang			100%	100%	3,17%	<
5.11	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			1 Paket	1 Paket	1 Paket			1 Paket	1 Paket	1 Paket			100%	100%	27,19%	<
5.12	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			10 Paket	8 Paket	25 Paket			10 Paket	8 Paket	11 Paket			100%	100%	44,00%	<
5.13	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			1 Paket	1 Paket	1 Paket			1 Paket	1 Paket	1 Paket			100%	100%	23,66%	<
5.14	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			3 Paket	3 Paket	3 Paket			3 Paket	3 Paket	3 Paket			100%	100%	16,74%	<
5.15	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			106 Laporan	80 Laporan	102 Laporan			174 Laporan	80 Laporan	23 Laporan			164%	100%	22,55%	<

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target RPJMD/Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Tingkat/Rasio Capaian pada Tahun Ke-					Interpretasi 2023 belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
		2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023 TW1	2019	2.020	2021	2022	2023 TW1	
1	2	3					4					5					6
5.16	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			76 Unit	79 Unit	181 Unit			74 Unit	79 Unit	42 Unit			97,37%	100%	23,20%	<
5.17	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan			2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan			100%	100%	18,25%	<
5.18	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			48 Laporan	48 Laporan	48 Laporan			48 Laporan	48 Laporan	12 Laporan			100%	100%	25,00%	<
5.19	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya			40 Unit	40 Unit	40 Unit			40 Unit	40 Unit	15 Unit			100%	100%	37,50%	<
5.20	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			290 Unit	367 Unit	457 Unit			290 Unit	367 Unit	126 Unit			100%	100%	27,57%	<
5.21	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			4 Unit	4 Unit	4 Unit			4 Unit	4 Unit	4 Unit			100%	100%	3,43%	<
5.22	Jumlah Laporan Hasil Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat yang Ditingkatkan			1 Laporan	2 Laporan	2 Laporan			1 Laporan	2 Laporan	1 Laporan			100%	100%	50,00%	<
5.23	Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat			3 Laporan	3 Laporan	4 Laporan			3 Laporan	3 Laporan	2 Laporan			100%	100%	50,00%	<
5.24	Jumlah Laporan Hasil Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya yang Ditingkatkan			19 Laporan	16 Laporan	16 Laporan			19 Laporan	16 Laporan	6 Laporan			100%	100%	37,50%	<
5.25	Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Fasilitas Pameran Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya			3 Laporan	6 Laporan	7 Laporan			3 Laporan	6 Laporan	-			100%	100%	-	<
5.26	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung			2 Laporan	4 Laporan	4 Laporan			2 Laporan	4 Laporan	1 Laporan			100%	100%	33,33%	<

Pada indikator “Indeks Kepuasan Mitra Kerja terhadap Badan Penghubung” dihasilkan dari perhitungan 3 survei pelayanan antara lain:

- a. Survey kepuasan terhadap pelayanan fasilitasi hubungan antar lembaga digunakan untuk mengukur tingkat kepuasan yang diberikan kepada *stakeholder*. Layanan hubungan antar lembaga menjadikan tingkat kepuasan pejabat/instansi/lembaga pusat/daerah yang di fasilitasi sebagai indikator kinerja dengan menggunakan kuisioner kepuasan sedangkan saran dan masukan berupa keluhan yang disampaikan oleh *stakeholder* yang dilayani baik secara lisan maupun tertulis sangat penting untuk ditindaklanjuti dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan Badan Penghubung.
- b. Survey Kepuasan terhadap Pelayanan Mess pada akhir periode Renstra yaitu pada tahun 2022 mendapat hasil 91,61 yang artinya mutu pelayanan Mess Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Timur “Sangat Baik”. Akan tetapi, walaupun dalam kategori “Sangat Baik” yang artinya pelayanan Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Timur telah mengalami perubahan yang meningkat, masih ada unsur-unsur pelayanan yang perlu diperbaiki untuk lebih memaksimalkan mutu pelayanan A (Sangat Baik) dan ada pula unsur pelayanan yang perlu dipertahankan tetapi masih perlu ditingkatkan agar pelayanan Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Timur khususnya pelayanan terhadap tamu mess lebih baik. Untuk indikator ini dianggap masih relevan untuk mengukur keberhasilan kinerja Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Timur. Akan tetapi masih ditemukan keluhan terhadap berbagai pelayanan yang diberikan. Oleh karena itu, untuk meningkatkan kualitas pelayanan Mess salah satunya dengan cara menindaklanjuti kritik dan saran agar pelayanan yang diberikan menjadi lebih baik.
- c. Survei kepuasan terhadap pelayanan fasilitasi promosi dan informasi, khususnya di Anjungan Kaltim TMII pada akhir periode Renstra yaitu pada tahun 2022 mendapat hasil 96,84 yang artinya mutu pelayanan terhadap mitra kerja dan pengunjung Anjungan Kaltim TMII “Sangat Baik”. Meskipun hasil survei dalam kategori “Sangat Baik” yang artinya pelayanan fasilitasi promosi produk unggulan dan pelestarian seni budaya pada Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Timur telah mengalami perubahan yang meningkat, tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa masih ada keluhan dari pengguna layanan fasilitasi promosi dan informasi di

Anjungan Kaltim, sehingga penanganan keluhan serta tindak lanjutnya menjadi perhatian khusus dan bahan masukan untuk perbaikan layanan fasilitasi promosi dan informasi yang akan datang.

Salah satu faktor yang membuat jumlah wisatawan yang berkunjung ke Anjungan Kaltim di TMII dapat terealisasi dengan baik adalah letak Anjungan Kaltim yang berada di salah satu tempat wisata yang diminati dan sebagai tempat tujuan liburan dan refreshing pada saat momen-momen tertentu seperti perayaan tahun baru, akhir pekan, libur sekolah, dan lain sebagainya. Kelengkapan fasilitas sarana dan prasarana di Anjungan Kaltim juga ditingkatkan berupa media aplikasi *Changing Background*, *Custome Changing 3D*, Video promosi daerah 360° /Tour 3D dan papan informasi *digital touchscreen*. Pada tahun 2023 di Anjungan Kaltim TMII akan dilakukan revitalisasi secara menyeluruh dan mengubah tampilan bangunan-bangunan di Anjungan Kaltim menjadi miniatur bangunan-bangunan khas Kaltim seperti Lamin (media informasi Kabupaten/Kota), Rumah Barrau (kantor), Rumah Gajah Menyusu (panggung), Rumah Dahor (kantin), Rumah Lou Upak (ruang UMKM), Masjid Shiratal Mustaqim (musholla), Plaza IKN dan penambahan ruang Hologram/Informasi Digital. Diharapkan dengan penambahan sarana prasarana tersebut maka upaya Anjungan Kaltim TMII sebagai *show window* Provinsi Kalimantan Timur di wilayah Jakarta Bogor Depok Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek) dan informasi mengenai lokasi Ibu Kota Negara (IKN) di Kalimantan Timur lebih maksimal lagi. Pencapaian terhadap jumlah kunjungan wisatawan tidak sepenuhnya bergantung pada keberhasilan pencapaian dalam hal realisasi program/kegiatan yang ada. Tetapi program/kegiatan tersebut diharapkan dapat menunjang atau bahkan mendorong pencapaian tersebut lebih baik lagi.

Selain kinerja, realisasi APBD juga dijadikan sebagai ukuran yang digunakan untuk mengetahui sejauh mana efektifitas penggunaan dana untuk mencapai kinerja pada Renstra periode sebelumnya. Anggaran dan realisasi target kinerja APBD pada PD Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Timur dapat digambarkan dalam tabel dibawah ini:

Tabel 2.5.
Anggaran dan Realisasi Keuangan Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Timur
Renstra 2019-2023

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-				Realisasi Anggaran pada Tahun ke-			
	1	2	3	4	1	2	3	4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)
PENDAPATAN	Rp 320,000,000.00	Rp 326,400,000.00	Rp 360,000,000.00	Rp 417,500,000.00	Rp 329,040,000.00	Rp 68,470,000.00	Rp 108,501,200.00	Rp 650,871,200.00
1. Pendapatan Retribusi Daerah	Rp 320,000,000.00	Rp 326,400,000.00	Rp 360,000,000.00	Rp 417,500,000.00	Rp 329,040,000.00	Rp 68,470,000.00	Rp 108,501,200.00	Rp 650,871,200.00
BELANJA	Rp 19,048,030,000.00	Rp 10,613,295,882.50	Rp 14,137,890,000.00	Rp 15,988,861,403.00	Rp 17,678,466,599.50	Rp 10,004,269,800.00	Rp 12,705,243,318.00	Rp 15,418,406,289.00
1. Belanja Operasi	Rp 10,277,620,000.00	Rp 9,335,895,882.50	Rp 13,285,279,760.00	Rp 15,040,664,903.00	Rp 9,147,134,420.00	Rp 8,727,029,300.00	Rp 11,882,120,963.00	Rp 14,516,162,474.00
a. Belanja Pegawai	Rp 1,841,080,000.00	Rp 2,193,140,000.00	Rp 2,360,720,000.00	Rp 2,593,569,426.00	Rp 1,457,435,000.00	Rp 1,801,685,000.00	Rp 2,182,205,000.00	Rp 2,448,900,000.00
b. Belanja Barang dan Jasa	Rp 8,436,540,000.00	Rp 7,142,755,882.50	Rp 10,924,559,760.00	Rp 12,447,095,477.00	Rp 7,689,699,420.00	Rp 6,925,344,300.00	Rp 9,699,915,963.00	Rp 12,067,262,474.00
2. Belanja Modal	Rp 8,770,410,000.00	Rp 1,277,400,000.00	Rp 852,610,240.00	Rp 948,196,500.00	Rp 8,531,332,179.50	Rp 1,277,240,500.00	Rp 823,122,355.00	Rp 902,243,815.00
a. Belanja Peralatan dan Mesin	Rp 6,673,560,000.00	Rp 1,277,400,000.00	Rp 502,030,000.00	Rp 756,117,500.00	Rp 6,507,880,479.50	Rp 1,277,240,500.00	Rp 476,947,420.00	Rp 715,043,815.00
b. Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp 2,096,850,000.00	Rp -	Rp 293,160,240.00	Rp 180,101,000.00	Rp 2,023,451,700.00	Rp -	Rp 288,809,935.00	Rp 175,500,000.00
c. Belanja Modal Aset Lainnya	Rp -	Rp -	Rp 57,420,000.00	Rp 11,978,000.00	Rp -	Rp -	Rp 57,365,000.00	Rp 11,700,000.00

Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-				Rata-rata Pertumbuhan	
1	2	3	4	Anggaran	Realisasi
(12)	(13)	(14)	(15)	(17)	(18)
1,03	0,21	0,30	1,56	0,09	1,60
1,03	0,21	0,30	1,56		
0,93	0,94	0,90	0,96	0,01	0,02
0,89	0,93	0,89	0,97		
0,79	0,82	0,92	0,94		
0,91	0,97	0,89	0,97		
0,97	1,00	0,97	0,95		
0,98	1,00	0,95	0,95		
0,96		0,99	0,97		
		1,00	0,98		

Berdasarkan tabel 2.5. di atas baik dari sisi kinerja program maupun keuangan menunjukkan hasil yang cukup baik. Dari sisi kinerja, capaian realisasi seluruh indikator kinerja rata-rata tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Dari sisi keuangan selama tahun 2019-2022 pada masa RENSTRA 2019-2023 menunjukkan realisasi serapan anggaran rata-rata diatas 90 persen, dengan capaian kinerja yang tinggi dan disertai oleh serapan anggaran tidak seratus persen dapat mengindikasikan penghematan anggaran dan kinerja perencanaan yang baik.

Interpretasi rasio antara realisasi dan anggaran serta faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pelayanan dan kinerja keuangan Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2022 dilihat dengan menyandingkan anggaran dan realisasi anggaran selama periode Renstra sebelumnya, dimana selama periode tahun 2020-2021 terdapat penurunan rasio penerimaan dan realisasi anggaran yang disebabkan bencana nasional Covid-19 yang melanda Indonesia.

Besarnya alokasi anggaran belanja yang ditetapkan untuk Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Timur dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.6.
Alokasi Anggaran Belanja Periode Tahun Anggaran 2019-2023

NO	TAHUN	ALOKASI ANGGARAN		JUMLAH ANGGARAN	KENAIKAN (%)
		BELANJA LANGSUNG	BELANJA TIDAK LANGSUNG		
1	2019	17.206.950.000,00	1.841.080.000,00	19.048.030.000,00	-
2	2020	8.728.055.882,50	1.885.240.000,00	10.613.295.882,50	(44,28)
		BELANJA			
3	2021		14.137.890.000,00	14.137.890.000,00	33,21
4	2022		15.988.861.403,00	15.988.861.403,00	11,57
5	2023		27.473.058.552,00	27.473.058.552,00	41,80

4. Kelompok Sasaran Layanan

Sebagaimana diamanatkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, bahwa setiap penyelenggara pelayanan publik, baik yang memberikan pelayanan kepada masyarakat secara langsung maupun tidak langsung wajib menyusun, menetapkan dan menerapkan

standar pelayanan untuk setiap jenis pelayanan sebagai tolak ukur dalam penyelenggaraan pelayanan di lingkungan masing-masing.

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan Undang-undang Pelayanan Publik tersebut, maka telah ditetapkan peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Peraturan pedoman Standar Pelayanan ini merupakan revisi dari Permen PAN dan RB Nomor Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat. Revisi peraturan ini perlu dilakukan karena dipandang peraturan yang sebelumnya kurang sesuai dengan perkembangan teknologi informasi yang semakin banyak dipergunakan sebagai sarana penunjang pelayanan, serta untuk mempermudah proses penyusunan dan meningkatkan kemandirian unit pelayanan dalam penyusunan Standar Pelayanan.

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi yang ada serta kewenangan yang melekat pada masing-masing Bidang, maka kelompok sasaran dapat dijelaskan berdasarkan jenis pelayanan Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Timur antara lain:

Tabel 2.7.
Jenis Pelayanan dan Kelompok Sasaran

No	Bidang	Jenis Layanan	Kelompok Sasaran
1	Pelayanan Mess	Layanan Pengguna Mess	Masyarakat umum, pelaku usaha, instansi, ASN di Lingkungan Prov. Kaltim
2	Hubungan Antar Lembaga	Layanan Fasilitasi Kelembagaan Aparatur	Seluruh Perangkat Daerah di Lingkungan Prov. Kaltim
3	Hubungan Antar Lembaga	Layanan Fasilitasi Pejabat Pusat dan Daerah	Kementerian/Lembaga dan Pemda
4	Hubungan Antar Lembaga	Layanan Fasilitasi Pengurusan PDLN	Seluruh Perangkat Daerah di Lingkungan Prov. Kaltim
5	Hubungan Antar Lembaga	Layanan Fasilitasi Sosial dan Kemasyarakatan	Masyarakat Kaltim di Jakarta
6	Hubungan Antar Lembaga	Layanan Pembinaan Mahasiswa	AMKT Pulau Jawa
7	Hubungan Antar Lembaga	Layanan Publikasi dan Dokumentasi Pejabat Prov.Kaltim di Jakarta	Seluruh Perangkat Daerah di Lingkungan Prov. Kaltim
8	Promosi dan Informasi	Layanan fasilitasi promosi produk unggulan daerah dan pelestarian seni budaya di Anjungan Kaltim TMII	Dinas Pariwisata Prov. Kaltim dan Kab/Kota, DPMPSTP, Disperindagkop, Dispora, Diskominfo, Masyarakat Umum, Pelaku Usaha dan Instansi serta K/L terkait lainnya

9	Promosi dan Informasi	Layanan fasilitasi pameran produk unggulan dan pelestarian seni budaya di Jabodetabek	Dinas Pariwisata Prov. Kaltim dan Kab/Kota, DPMPTSP, Disperindagkop, Dispora, Diskominfo, Masyarakat Umum, Pelaku Usaha dan Instansi serta K/L terkait lainnya
10	Promosi dan Informasi	Layanan pemberian informasi terhadap wisatawan nusantara/mancanegara di Anjungan TMII	Wisatawan Nusantara/ Mancanegara, kedutaan besar

5. Mitra Badan Penghubung dalam Pemberian Pelayanan

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, di samping mematuhi kode etik, aparatur dan sistem manajemen publik harus mengembangkan keterbukaan dan sistem akuntabilitas, bersikap terbuka dan bertanggung jawab untuk mendorong para pimpinan dan seluruh sumber daya manusia di dalamnya berperan dalam mengamalkan dan melembagakan kode etik dimaksud, sehingga dapat menjadikan diri mereka sebagai panutan masyarakat; dan itu dilakukan sebagai bagian dari pelaksanaan tanggung jawab dan pertanggungjawaban kepada masyarakat dan negara. Upaya pemberdayaan masyarakat dan dunia usaha, peningkatan partisipasi dan kemitraan, akan lebih mendorong akuntabilitas dalam pemanfaatan sumber daya, dan adanya keputusan-keputusan pembangunan yang benar-benar diarahkan sesuai prioritas dan kebutuhan masyarakat, serta dilakukan secara riil dan adil sesuai aspirasi dan kepentingan masyarakat. Adapun mitra Badan Penghubung dalam pemberian pelayanan antara lain :

1. Pelayanan Mess dalam hal pembayaran kamar secara non tunai bekerjasama dengan Bankaltim Kaltara melalui QRis.
2. Pelayanan Keprotokolan terhadap pejabat daerah/pusat bekerjasama dengan Biro Administrasi Pimpinan Setda Prov. Kaltim.
3. Pelayanan Promosi dan Informasi bekerjasama dengan Dinas Pariwisata Prov. Kaltim dan Kab/Kota, DPMPTSP, Disperindagkop, Dispora, Diskominfo dan Instansi terkait lainnya dalam hal penyediaan informasi terkait Produk Unggulan, Pelestarian Seni Budaya dan Peluang Investasi yang ada di Kalimantan Timur.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BADAN PENGHUBUNG PROV. KALTIM DI JAKARTA

Menghadapi dinamika lingkungan strategis baik regional, nasional, maupun global serta memperhatikan perencanaan sebagai alat manajerial untuk memelihara keberlanjutan dan perbaikan kinerja lembaga, maka Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Timur dalam mengemban tugas dan perannya harus memperhatikan isu-isu strategis yang berkembang saat ini dan lima tahun ke depan.

Hal tersebut sejalan dengan amanat RPD Provinsi Kalimantan Timur, sehingga menuntut terjadinya perubahan peran Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Timur dalam orientasi dan pendekatan yang digunakan dalam perencanaan dan koordinasi pembangunan sebagai upaya mendukung tercapainya visi dan misi pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Timur tahun 2024-2026.

A. Permasalahan Pelayanan Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Timur

Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Timur merupakan unsur pelaksanaan tugas pemerintah provinsi yang berkedudukan di Jakarta, bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut terdapat beberapa permasalahan, antara lain:

1. Belum maksimalnya target penerimaan retribusi mess di Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Timur

Salah satu tugas Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Timur adalah pengelolaan mess, untuk meningkatkan PAD Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Timur maka diperlukan sosialisasi terhadap masyarakat dan Perangkat Daerah karena kurangnya informasi mengenai mess (fasilitas, tarif, lokasi dan lain-lain). Selain itu kondisi bangunan gedung Mess Kaltim di Jl. Kramat II No. 42 Jakarta perlu peremajaan sarana dan prasarana agar lebih menarik minat dan menambah kenyamanan aparatur dan masyarakat Kalimantan Timur sehingga diharapkan dapat meningkatkan PAD.

2. Belum maksimalnya integrasi antara sistem pelaporan dengan sistem keuangan mengenai retribusi sewa kamar.

Keterpaduan, konsistensi dan sinkronisasi tidak hanya antara aspek pelaporan dengan penganggaran, tetapi seharusnya dilakukan antar satuan kerja. Hal ini sangat penting karena target capaian program dan atau target hasil (*outcome*) suatu kegiatan menuju visi daerah dapat dicapai melalui sinergi program dan kegiatan antar OPD. Sistem pelaporan dan sistem keuangan mengenai retribusi sewa kamar meskipun belum terintegrasi secara maksimal, namun telah ada upaya untuk meningkatkan sistem pembayaran melalui secara non tunai (QRIS) ke kas daerah melalui bank kaltimara.

3. Kualitas dan Kuantitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang perlu ditingkatkan

Salah satu kunci keberhasilan perencanaan pembangunan guna pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan sangat ditentukan oleh kemampuan serta keterampilan SDM aparatur pemerintah. Pelaksanaan pembangunan mengikutsertakan aparatur pemerintah bersama rakyat memegang peranan penting yaitu sebagai pelaksana dalam menjalankan pembangunan dan sebagai penggerak laju pembangunan. Aparatur pemerintah dituntut dalam menjalankan tugas dibidang masing-masing untuk lebih ulet, terampil, cekatan, berdedikasi tinggi dan menuju kepada suatu efisiensi untuk dapat mencapai tujuan nasional. Untuk itu, pengembangan kualitas SDM aparatur pemerintah di segala bidang merupakan keharusan mutlak.

Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Timur memiliki jumlah pegawai sebanyak 99 (sembilan puluh sembilan) orang yang terdiri dari 22 (dua puluh dua) orang PNS dan 77 (tujuh puluh tujuh) tenaga Non PNS. Sesuai Analisis Jabatan dan Analisa Beban Kerja jumlah PNS yang ideal adalah 39 (tiga puluh Sembilan) orang sehingga jumlah PNS yang ada sekarang belum memadai untuk memberikan pelayanan yang maksimal ditambah adanya PNS yang memasuki masa purna tugas. Berdasarkan hal tersebut maka permasalahan kualitas dan kuantitas SDM disetiap seksi sebagai berikut:

a) Sumber Daya Manusia (SDM) pada Anjungan Kaltim di TMII

Pada tahun 2021 Anjungan Kaltim di TMII mulai direvitalisasi dan didukung dengan sarana dan prasarana yang lebih meningkat dan

berkembang ke arah digitalisasi layanan sehingga perlu ditunjang oleh SDM yang kompeten dan berkualitas agar sarana dan prasarana yang tersedia untuk kegiatan fasilitasi pameran produk unggulan dan pelestarian seni budaya dapat berfungsi maksimal.

Selain itu untuk mengetahui tingkat keberhasilan penyampaian promosi dan informasi mengenai potensi pariwisata dan peluang investasi di Kalimantan Timur dibutuhkan pula Sumber Daya Manusia yang kompeten dan mampu menjelaskan mengenai peluang promosi dan informasi Kalimantan Timur baik secara langsung maupun melalui perangkat Teknologi Informasi.

Pengetahuan mengenai teknologi informasi, kondisi terkini Provinsi Kalimantan Timur, isu-isu terbaru tentang Ibu Kota Negara (IKN), peluang investasi, destinasi wisata unggulan serta seni budaya Kalimantan Timur perlu ditingkatkan melalui pendidikan dan pelatihan, baik dari BPSDM Prov. Kaltim, Dinas Pariwisata Prov. Kaltim maupun Lembaga swasta.

b) Sumber Daya Manusia (SDM) pada Kegiatan Fasilitasi Pejabat Pusat/Daerah

Salah satu tugas dan fungsi Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Timur adalah pelayanan fasilitasi pejabat daerah/pusat. Pada tahun 2022 pelayanan fasilitasi tidak hanya diberikan kepada Kepala Daerah (Gubernur, Wakil Gubernur dan Sekretaris Daerah), tetapi melayani hampir seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Hal tersebut membuat pelayanan fasilitasi yang diberikan Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Timur tidak maksimal. Hal tersebut dikarenakan terbatasnya jumlah SDM yang menangani khususnya seksi Hubungan Antar Lembaga, terutama pada saat kegiatan berlangsung secara bersamaan ditempat yang berbeda.

c) Sumber Daya Manusia (SDM) pada Kegiatan Pelayanan Mess

Kondisi sarana dan prasarana mess Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Timur sampai saat ini sudah mulai meningkat sehingga perlu ditunjang SDM yang kompeten dan berkualitas. SDM yang ada saat ini baik PNS dan Non PNS masih perlu ditingkatkan kompetensinya melalui pendidikan dan pelatihan baik dari BPSDM Prov. Kaltim maupun Lembaga swasta.

4. Belum Maksimalnya Pelayanan Informasi Melalui Sarana dan Prasarana Promosi Seni Budaya, Pariwisata dan Peluang Investasi Daerah Kalimantan Timur

Fungsi penting lainnya yang diemban Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Timur adalah dalam pelayanan informasi daerah dan fasilitasi penyelenggaraan promosi daerah yang ditujukan untuk meningkatkan dukungan dan penyebaran informasi daerah bagi pihak eksternal di Jakarta dan sekitarnya, maupun sebaliknya pengumpulan informasi dari pihak eksternal yang terkait dengan pembangunan dan pengembangan Provinsi Kalimantan Timur yang dapat ditindaklanjuti atau didayagunakan oleh perangkat daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Provinsi Kalimantan Timur selain memiliki ragam budaya dan destinasi wisata yang menarik juga mempunyai peluang investasi yang beragam dan menguntungkan. Terutama setelah Provinsi Kalimantan Timur ditetapkan menjadi lokasi Ibu Kota Negara (IKN) sehingga menjadi daya tarik bagi investor untuk menanamkan modal di Kalimantan Timur.

Tugas Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Timur salah satunya adalah mengenalkan keanekaragaman budaya dan pariwisata di Kalimantan Timur serta memfasilitasi kegiatan promosi produk unggulan dan pelestarian seni budaya di wilayah Jabodetabek. Sarana dan prasarana promosi mengenai Kaltim terutama di Anjungan Kalimantan Timur dirasa masih kurang maksimal, sehingga perlu adanya peningkatan sarana dan prasarana di bidang teknologi informasi dalam rangka menunjang promosi produk unggulan dan pelestarian seni budaya serta peluang investasi agar Kalimantan Timur bisa sejajar dengan provinsi lain terutama dalam penggunaan teknologi yang lebih maju (*digital technology*).

Untuk mengetahui tingkat keberhasilan penyampaian promosi dan informasi mengenai potensi pariwisata dan peluang investasi di Kalimantan Timur serta pelayanan fasilitasi promosi potensi daerah dibutuhkan masukan (*feedback*) dari mitra kerja dan masyarakat umum, salah satunya melalui survei kepuasan atas pelayanan fasilitasi promosi produk unggulan dan pelestarian seni budaya di Jabodetabek serta pelayanan promosi dan informasi di Anjungan Kaltim di TMII.

5. Kurangnya Informasi Terkait Tugas dan Fungsi Badan Penghubung Khususnya Pelayanan Fasilitasi Kelembagaan dan Keprotokolan untuk Seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur

Badan Penghubung mempunyai kedudukan yang strategis sebagai duta/perwakilan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam hal fasilitasi kelembagaan dan keprotokolan antara daerah dengan pusat, tetapi hal tersebut belum sepenuhnya diketahui oleh Perangkat Daerah yang ada di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Sehingga mulai tahun 2022 pelayanan fasilitasi kelembagaan dan keprotokolan telah ditingkatkan dengan menginformasikan hal tersebut melalui website dan media sosial Badan Penghubung, dengan demikian tugas dan fungsi Badan Penghubung khususnya pada fasilitas kelembagaan dan keprotokolan dapat lebih maksimal.

B. Isu Strategis

Dari berbagai identifikasi masalah dan hasil telaahan diatas, maka isu strategis penyelenggaraan Badan Penghubung Prov. Kaltim tiga tahun ke depan, meliputi:

1. Perlunya Perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Yang Lebih Representatif

Struktur organisasi Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Timur yang saat ini dipimpin oleh Kepala Badan (Eselon III), yang membawahi 4 kepala sub bagian dan seksi (eselon IV) yaitu Subbag Tata Usaha, Seksi Pelayanan, Seksi Hubungan Antar Lembaga dan Seksi Promosi dan Informasi seiring dengan kompleksitas dan tantangan ke depan sudah tidak representatif sehingga perlunya perubahan struktur organisasi dan tata kerja.

Dengan tersedianya berbagai fasilitas kegiatan (pengembangan mess Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur di Jakarta dan Anjungan Kaltim di Taman Mini Indonesia Indah) serta semakin luasnya hubungan dengan lembaga-lembaga nasional maupun internasional sudah selayaknya Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Timur dikembangkan menjadi organisasi yang lebih representatif dan koordinatif melalui peningkatan eselonering menjadi Eselon II.

2. Diperlukan Sarana dan Prasarana yang Baik untuk Meningkatkan Pelayanan Administrasi dan Operasional Kantor

Peningkatan pelayanan administrasi dan operasional kantor dilakukan melalui peningkatan sarana dan prasarana yang baik. Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Timur memerlukan gedung dan interior gedung serta sarana dan prasarana yang memadai untuk meningkatkan pelayanan sehingga muncul rasa nyaman sebagai daya tarik bagi aparatur yang bertugas ke Jakarta dan masyarakat luas.

3. Perlu Pengembangan dan Peningkatan Kualitas dan Kuantitas SDM

Salah satu tugas dan fungsi Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Timur adalah melakukan pembinaan kepada SDM Kaltim melalui pelatihan kemampuan kognitif dan kemampuan spiritual guna meningkatkan kualitas SDM Kaltim. Melalui pelatihan kemampuan kognitif dan spiritual diharapkan menghasilkan SDM yang memiliki tingkat keahlian yang lebih berkualitas secara optimal.

Selain itu upaya untuk meningkatkan jumlah SDM, Badan Penghubung mengajukan usulan penambahan pegawai (SDM) melalui Badan Kepegawaian Daerah untuk mengisi formasi sesuai Analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja.

4. Diperlukan Kegiatan Promosi dan Fasilitasi untuk Penyampaian Informasi

Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Timur merupakan etalase daerah Provinsi Kalimantan Timur di Jakarta. Keberadaan dan perannya turut memberikan pengaruh terhadap pencitraan Provinsi Kalimantan Timur oleh pihak-pihak eksternal di Jakarta dan sekitarnya. Provinsi Kalimantan Timur dengan segenap potensi dan permasalahan yang dihadapi masih sangat membutuhkan pihak luar dalam pengelolaan pengembangan maupun penanganannya. Oleh karena itu, kegiatan promosi melalui Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Timur diharapkan mampu menstimulir timbulnya persepsi positif serta daya tarik, kemauan, kepercayaan pihak luar untuk berpartisipasi dalam pembangunan Provinsi Kalimantan Timur.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Berdasarkan kondisi, potensi dan permasalahan serta tantangan yang dihadapi oleh Badan Penghubung Prov. Kaltim di Jakarta dan sesuai tugas pokok dan fungsinya sebagai perangkat daerah yang merupakan salah satu pelaku pembangunan yang diharapkan mampu berkontribusi nyata dalam pencapaian harapan terhadap terwujudnya pembangunan Provinsi Kalimantan Timur yang dicita-citakan menjadi maju dan mandiri yang ditekankan pada meningkatnya kemampuan pemerintah daerah, yang salah satunya dapat ditafsirkan sebagai harapan terhadap semakin meningkatnya kemampuan pemerintah daerah dalam menjalin hubungan kerja maupun kerjasama antar lembaga dalam proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

4.1. Tujuan dan Sasaran RENSTRA Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026

Penetapan tujuan dan sasaran perlu mempertimbangkan kompetensi yang dimiliki segenap sumber daya dalam organisasi. Seluruh sumber daya dalam organisasi harus mempunyai *core-competencies* untuk mencapai tujuan.

Sebagai salah satu komponen dari perencanaan strategis, tujuan yang dirumuskan merupakan gambaran tentang keadaan yang diinginkan oleh Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Timur di Jakarta selama kurun waktu 3 (tiga) tahun 2024-2026 berdasarkan tugas pokok dan fungsinya, serta sebagai upaya mendukung pencapaian Pembangunan Pemerintah Daerah seperti yang tertuang dalam RPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026. Tujuan ditetapkan harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Untuk itu, tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Timur.

Adapun tujuan Renstra Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026, adalah :

1. Mewujudkan layanan publik pemerintahan yang berkualitas

Tujuan ini diharapkan dapat malakukan reformasi pelayanan publik dalam menghadapi revolusi industriPemahaman tentang budaya pariwisata, pembangunan, potensi dan peluang investasi Kaltim juga merupakan hal terpenting dalam upaya mewujudkan misi Badan

Penghubung Provinsi Kalimantan Timur. Kemampuan aparatur memahami budaya memiliki kejelasan formal atas nilai, norma dan wewenang sebagai penuntun menuju ke arah kesiapan yang mampu memasuki setiap perubahan dengan tujuan membangun kebiasaan yang produktif. Aparatur yang telah memahami budaya Kalimantan Timur akan dapat mempromosikan Kalimantan Timur ke wisatawan agar tertarik berkunjung ke Kalimantan Timur. Dengan banyaknya wisatawan yang berkunjung maka akan menarik investor yang akan menanamkan modalnya ke Kalimantan Timur sehingga tujuan ini dapat terwujud.

Dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut juga harus diimbangi dengan meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang berakhlak mulia, cerdas dan terampil harus meningkatkan fasilitas penunjang kerja dan gedung kantor yang lengkap serta kualitas SDM melalui pelatihan kognitif dan kemampuan spiritual yang seimbang. Berdasarkan tujuan tersebut maka sasaran yang akan dicapai sebagai berikut:

- Meningkatnya kualitas layanan publik Badan Penghubung Provinsi

2. Mewujudkan birokrasi pemerintahan yang akuntabel

Birokrasi pemerintahan yang akuntabel adalah struktur tatanan organisasi yang mampu menyajikan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara terbuka, cepat dan tepat kepada masyarakat dan mampu memberikan pelayanan yang memuaskan bagi masyarakat serta mampu menjelaskan dan mempertanggungjawabkan setiap kebijakannya kepada publik. Dengan tujuan ini diharapkan Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Timur dapat mewujudkannya melalui sasaran:

- Meningkatnya akuntabilitas kinerja Badan Penghubung Provinsi

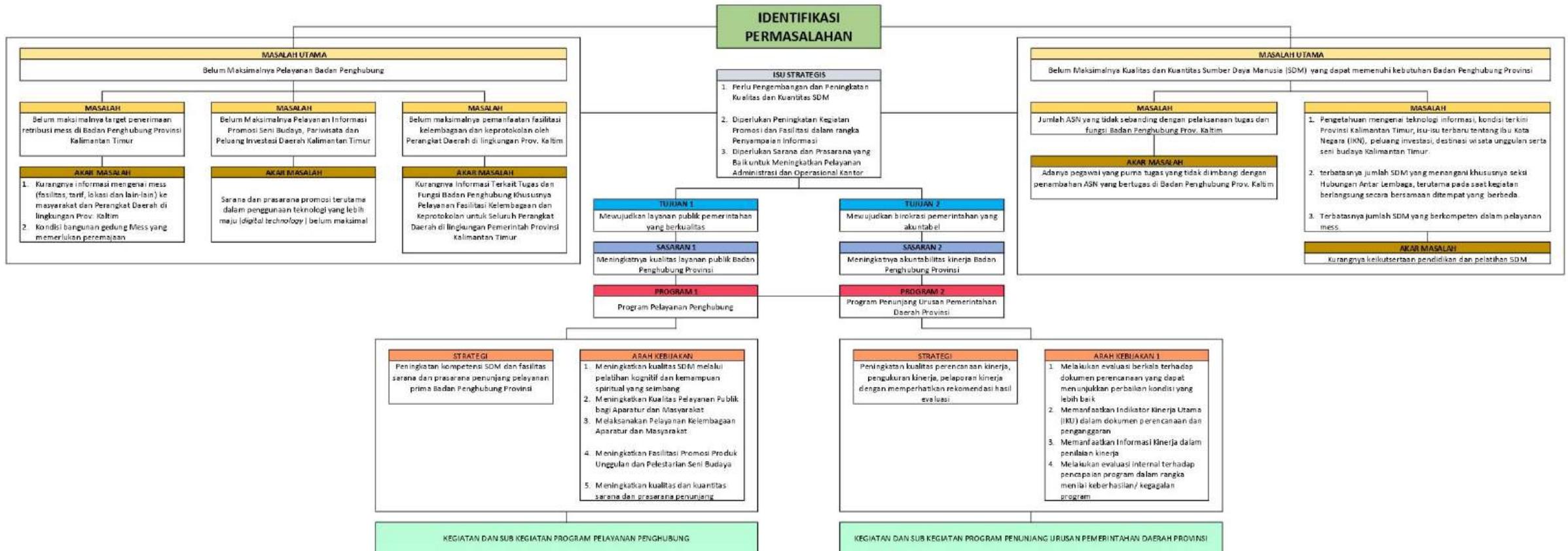
Tabel 4.1.
Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja Badan Penghubung Prov. Kaltim
Tahun 2024-2026

Tujuan	Indikator Tujuan	Satuan	Target					Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal	Target			Kondisi Akhir	Program/Kegiatan
			Awal	2024	2025	2026	Akhir					2024	2025	2026		
Mewujudkan layanan publik pemerintahan yang berkualitas	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Badan Penghubung Provinsi	Poin	89,84	91,27	92,00	92,93	92,93	Meningkatnya kualitas layanan publik Badan Penghubung Provinsi	Indeks Kepuasan terhadap Pelayanan Mess	Poin	91,61	91,80	92,00	92,30	92,30	Program Pelayanan Penghubung
									Indeks Kepuasan terhadap Pelayanan Fasilitas Hubungan Antar Lembaga	Poin	86,87	87	88	90	90	Pelaksana Pelayanan Penghubung
									Indeks Kepuasan terhadap Pelayanan Fasilitas Promosi dan Informasi	Poin	96,84	95,00	96,00	96,50	96,50	
Mewujudkan birokrasi pemerintahan yang akuntabel	Nilai Akuntabilitas Kinerja Badan Penghubung Provinsi	Poin	72,43	72,47	72,51	72,55	72,55	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Badan Penghubung Provinsi	Nilai Akuntabilitas Kinerja Badan Penghubung Provinsi	Poin	72,43	72,47	72,51	72,55	72,55	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

4.2. Cascading Kinerja Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Timur

Gambar 4.1.

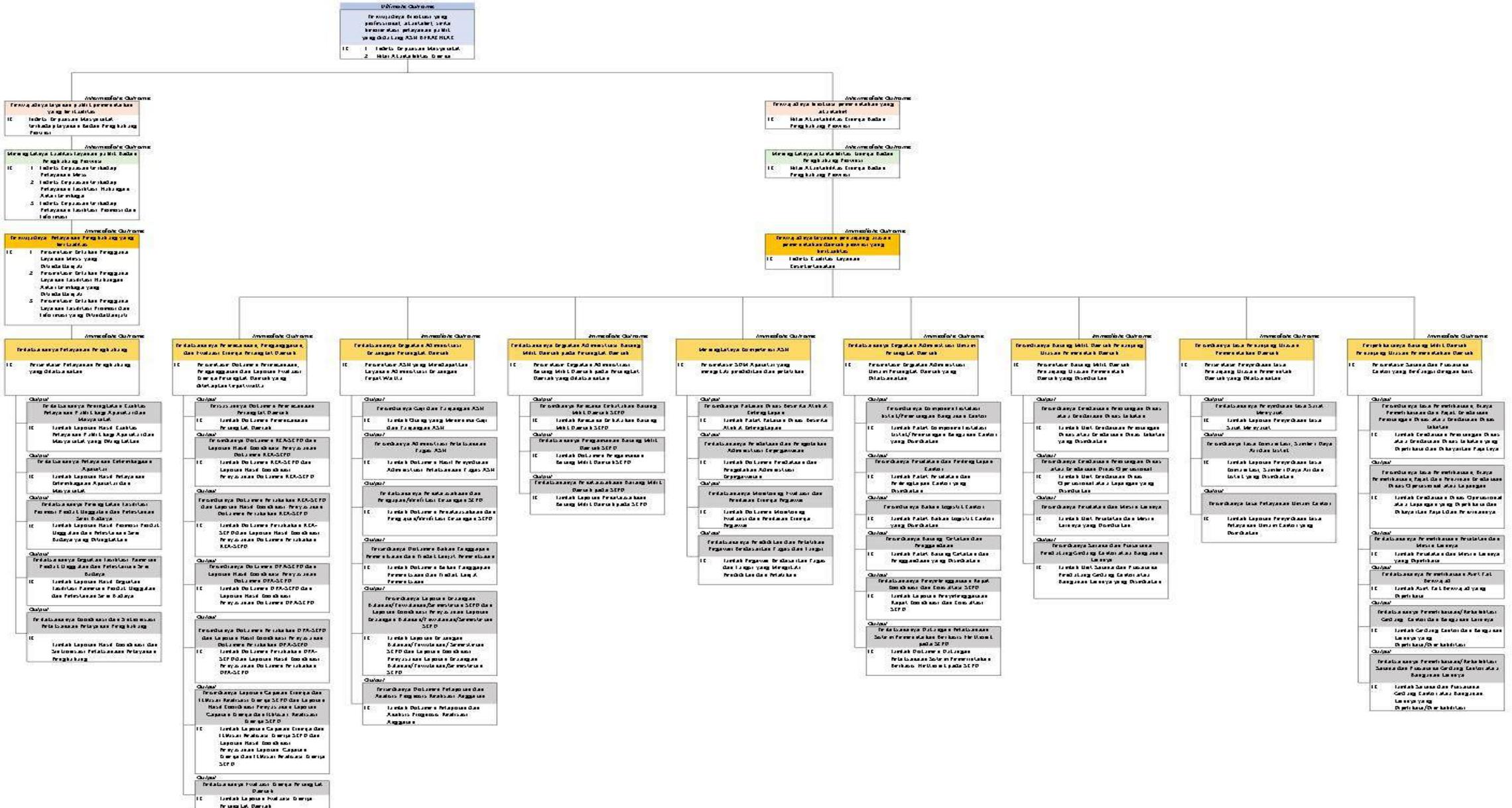
CASCADING PERMASALAHAN DAN ARAH KEBIJAKAN BADAN PENGHUBUNG PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2024-2026



Gambar 4.2.

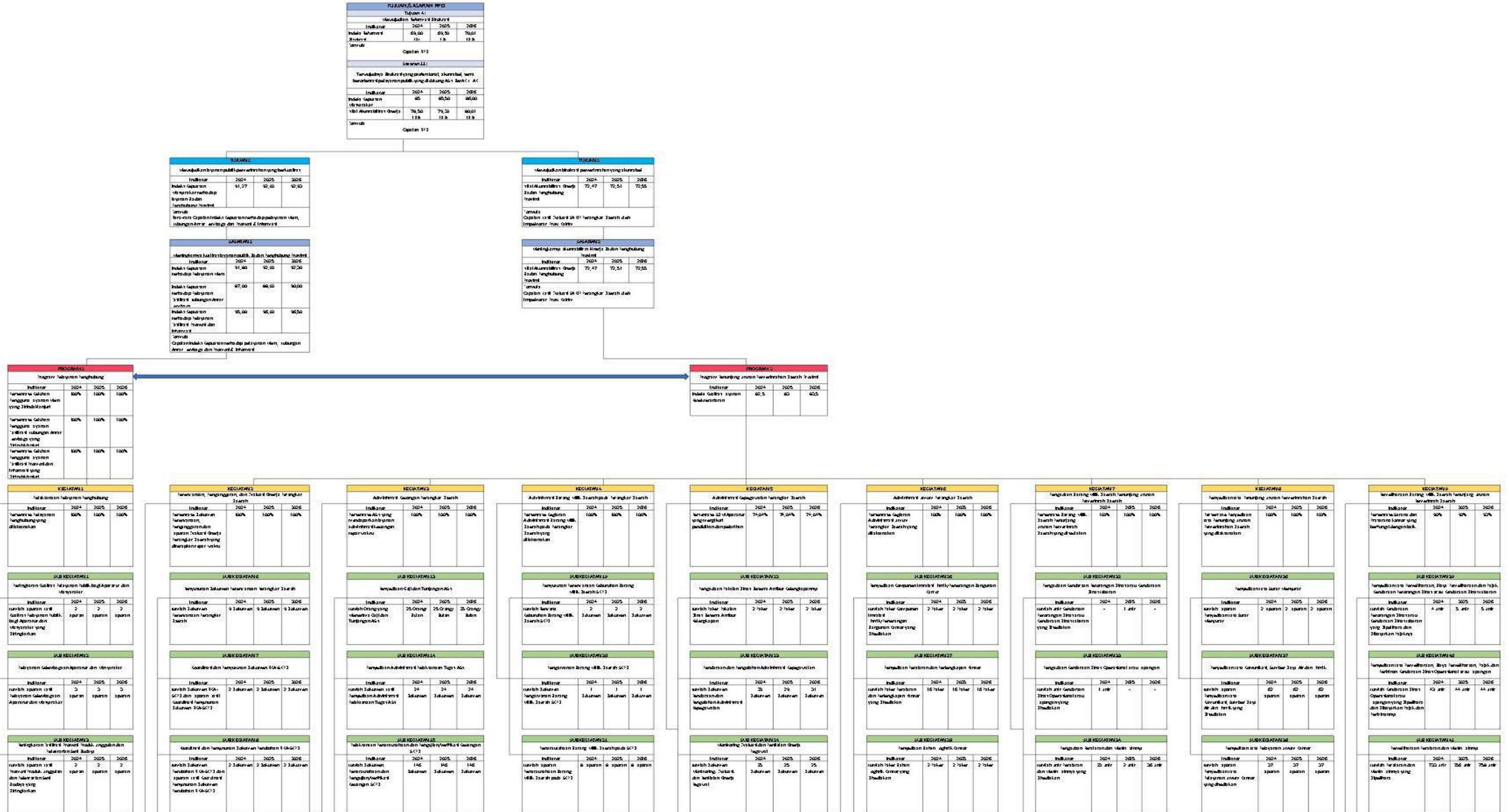
POHON KINERJA

BADAN PENGHUBUNG PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2024-2026



Gambar 4.3

CASCADING KINERJA BADAN PENGHUBUNG PROV. KALTIM TAHUN 2024-2026



BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Untuk mencapai tujuan dan sasaran di dalam Rencana Strategis (Renstra) diperlukan strategi. Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan. Rumusan strategi Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Timur dihasilkan dari hasil analisis strategis lingkungan yaitu S – O (*Strengths – Opportunity*) yang mengarah pada kekuatan atau keunggulan untuk meraih peluang dan tantangan yang ada.

Strategi Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Timur yang ditetapkan guna mewujudkan tujuan melalui pencapaian beberapa sasaran yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut:

1. Strategi 1: Peningkatan kompetensi SDM dan fasilitas sarana dan prasarana penunjang pelayanan prima Badan Penghubung Provinsi.

Strategi ini juga sebagai upaya mewujudkan tujuan Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Timur khususnya pada pelayanan publik yang berkualitas dengan cara meningkatkan kualitas SDM melalui pelatihan kognitif dan kemampuan spiritual yang seimbang, meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat, melaksanakan Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat, meningkatkan Fasilitas Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya, melaksanakan Kegiatan Fasilitas Pameran Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya dan meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi kepada mitra kerja.

Strategi tersebut digunakan untuk mencapai sasaran:

- Meningkatnya kualitas layanan Publik Badan Penghubung Provinsi
2. Strategi 2: Peningkatan kualitas perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dengan memperhatikan rekomendasi hasil evaluasi
Upaya untuk mewujudkan tujuan Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Timur khususnya untuk mewujudkan birokrasi yang akuntabel yaitu dengan meningkatkan Pelayanan birokrasi yang transparan dan berintegritas dengan mengembangkan profesionalisme aparatur guna meningkatkan kualitas layanan publik khususnya pada kualitas perencanaan, pengukuran dan pelaporan kinerja adalah dengan melakukan evaluasi berkala terhadap dokumen perencanaan yang dapat menunjukkan

perbaikan kondisi yang lebih baik, memanfaatkan Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam dokumen perencanaan dan penganggaran, memanfaatkan Informasi Kinerja dalam penilaian kinerja dan melakukan evaluasi internal terhadap pencapaian program dalam rangka menilai keberhasilan/kegagalan program.

Strategi ini digunakan untuk mencapai sasaran :

- Meningkatkan akuntabilitas kinerja Badan Penghubung Provinsi

Kebijakan diambil sebagai arah dalam menentukan bentuk konfigurasi program kegiatan untuk mencapai tujuan. Kebijakan dapat bersifat internal, yaitu kebijakan dalam mengelola pelaksanaan program-program pembangunan maupun bersifat eksternal yaitu kebijakan dalam rangka mengatur, mendorong dan memfasilitasi kegiatan masyarakat. Kebijakan yang ditempuh adalah sebagai berikut:

1. Strategi 1: Peningkatan kompetensi SDM dan fasilitas sarana dan prasarana penunjang pelayanan prima Badan Penghubung Provinsi.
 - ✓ Meningkatkan kualitas SDM melalui pelatihan kognitif dan kemampuan spiritual yang seimbang.
 - ✓ Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat
 - ✓ Melaksanakan Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat
 - ✓ Meningkatkan Fasilitas Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya
 - ✓ Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana penunjang
2. Strategi 2: Peningkatan kualitas perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dengan memperhatikan rekomendasi hasil evaluasi.
 - ✓ Melakukan evaluasi berkala terhadap dokumen perencanaan yang dapat menunjukkan perbaikan kondisi yang lebih baik
 - ✓ Memanfaatkan Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam dokumen perencanaan dan penganggaran
 - ✓ Memanfaatkan Informasi Kinerja dalam penilaian kinerja
 - ✓ Melakukan evaluasi internal terhadap pencapaian program dalam rangka menilai keberhasilan/kegagalan program

Tabel 5.1.
PENENTUAN STRATEGI
BADAN PENGHUBUNG PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR DI
JAKARTA

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	STRATEGI
Meningkatnya kualitas layanan publik Badan Penghubung Provinsi	Indeks Kepuasan Terhadap Pelayanan Mess	Peningkatan kompetensi SDM dan fasilitas sarana dan prasarana penunjang pelayanan prima Badan Penghubung Provinsi
	Indeks Kepuasan Terhadap Pelayanan Fasilitas Hubungan Antar Lembaga	
	Indeks Kepuasan Terhadap Pelayanan Fasilitas Promosi Dan Informasi	
Meningkatnya akuntabilitas kinerja Badan Penghubung Provinsi	Nilai Akuntabilitas Kinerja Badan Penghubung Provinsi	Peningkatan kualitas perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dengan memperhatikan rekomendasi hasil evaluasi

Tabel 5.2.
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, KEBIJAKAN dan PROGRAM/KEGIATAN
BADAN PENGHUBUNG PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
TAHUN 2024 - 2026

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
1 Mewujudkan layanan publik pemerintahan yang berkualitas	1 Meningkatkan kualitas layanan publik Badan Penghubung Provinsi	1 Peningkatan kompetensi SDM dan fasilitas sarana dan prasarana penunjang pelayanan prima Badan Penghubung Provinsi	1 Meningkatkan kualitas SDM melalui pelatihan kognitif dan kemampuan spiritual yang seimbang. 2 Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat 3 Melaksanakan Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat 4 Meningkatkan Fasilitas Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya	Program Pelayanan Penghubung Pelaksana Pelayanan Penghubung - Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat - Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat - Peningkatan Fasilitas Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya - Kegiatan Fasilitas Pameran Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya - Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung

			5 Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana penunjang	
2 Mewujudkan birokrasi pemerintahan yang akuntabel	2 Meningkatnya akuntabilitas kinerja Badan Penghubung Provinsi	2 Peningkatan kualitas perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dengan memperhatikan rekomendasi hasil evaluasi	6 Melakukan evaluasi berkala terhadap dokumen perencanaan yang dapat menunjukkan perbaikan kondisi yang lebih baik 7 Memanfaatkan Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam dokumen perencanaan dan penganggaran 8 Memanfaatkan Informasi Kinerja dalam penilaian kinerja 9 Melakukan evaluasi internal terhadap pencapaian program dalam rangka menilai keberhasilan/ kegagalan program	<p>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi</p> <p>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD <p>Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</p> <p>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD - Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD - Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran <p>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD - Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD <p>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian

				<ul style="list-style-type: none">- Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai- Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi <p>Administrasi Umum Perangkat Daerah</p> <ul style="list-style-type: none">- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor- Penyediaan Bahan Logistik Kantor- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD <ul style="list-style-type: none">- Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD <p>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</p> <ul style="list-style-type: none">- Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan- Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan- Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya- Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya <p>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</p> <ul style="list-style-type: none">- Penyediaan Jasa Surat Menyurat- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor <p>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</p> <ul style="list-style-type: none">- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya- Pemeliharaan Aset Tak Berwujud <p>Pemeliharaan/Rehabilitasi</p> <ul style="list-style-type: none">- Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya- Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
--	--	--	--	---

BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN dan SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Berdasarkan tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan pada bagian sebelumnya, maka disusun langkah-langkah rencana strategis yang lebih operasional untuk kurun waktu tiga tahun terakhir pada masa Renstra tahun 2024-2026, meliputi program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif. Program ini merupakan penjabaran dari kebijakan strategis Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Timur dengan tetap mengacu pada program pembangunan RPD Kalimantan Timur 2024-2026.

6.1. Rencana Program

Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang diturunkan menjadi satu atau lebih sub kegiatan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan, dalam hal ini sasaran Renstra perangkat daerah. Program merupakan kristalisasi kebijakan dari masing-masing strategi yang pada dasarnya adalah untuk mencapai sasaran.

Melalui rumusan kebijakan yang tepat, tiap program diharapkan mampu menjawab berbagai permasalahan yang dihadapi dan akan diselesaikan oleh Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Timur dalam tiga tahun mendatang.

Program Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Timur yang disusun untuk mencapai tujuan dan sasaran adalah sebagai berikut:

1. Program Pelayanan Penghubung

Program ini menggambarkan pelayanan yang dilaksanakan oleh Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Timur pada Seksi Pelayanan, Seksi Hubungan Antar Lembaga dan Seksi Promosi dan Informasi disusun dalam rangka mendukung pencapaian kinerja dan meningkatkan kualitas pelayanan yang akan diberikan kepada masyarakat. Dalam Program Pelayanan Penghubung terdapat kegiatan dan beberapa sub kegiatan yang mencakup:

a. Pelaksanaan Pelayanan Penghubung dengan sub kegiatan :

- Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat.
- Peningkatan Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat.
- Peningkatan Fasilitasi Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya.
- Kegiatan Fasilitasi Pameran Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya.
- Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung.

2. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

Program ini merupakan program penunjang dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas rutin, operasional kantor dan urusan pemerintahan Badan Penghubung yang dilaksanakan oleh Subbag Tata Usaha. Dalam Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi terdapat kegiatan dan beberapa sub kegiatan yang mencakup :

a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
- Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
- Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD
- Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran

c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

- Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD

- Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
- Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

- Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
- Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
- Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai
- Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

e. Administrasi Umum Perangkat Daerah

- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD

f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

g. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- Pemeliharaan Aset Tak Berwujud
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

- Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

6.2. Indikator Pencapaian Tujuan

Masukan (Input) adalah sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan berjalan untuk menghasilkan keluaran (output). Input kegiatan meliputi antara lain sumber daya manusia, dana dan fasilitas.

Keluaran (Output) adalah sesuatu yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan yang dapat berupa produk jasa fisik dan non fisik, seperti produk perencanaan pembangunan, hasil kajian strategi pembangunan, komputer, dan lain-lain.

Hasil (Outcome) adalah sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan. Misalnya tersebar dan dimanfaatkannya produk perencanaan oleh *stakeholder* dan masyarakat.

Manfaat (Benefit) adalah kegunaan suatu keluaran yang dirasakan langsung oleh pengguna dan masyarakat secara keseluruhan. Misalnya pembangunan industri pengolahan telah mampu menyediakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan pekerjanya.

Dampak (Impact) adalah ukuran pengaruh yang ditimbulkan baik positif maupun negatif. Misalnya, pendapatan rumah tangga meningkat (%/tahun), produktivitas dan infrastruktur tingkat wilayah meningkat (%).

Secara umum indikator pencapaian kinerja yang ingin diterapkan pada periode tiga tahun ke depan adalah penekanan kepada indikator keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*) dari program dan kegiatan serta sub kegiatan perencanaan dan kajian strategis pembangunan. Oleh karena itu, masing-masing program, kegiatan dan sub kegiatan selanjutnya dilengkapi dengan indikator kinerja, kelompok sasaran dan pagu indikatif.

Program dan Kegiatan Badan Penghubung Prov. Kaltim di Jakarta yang direncanakan untuk Periode Tahun 2024 – 2026 dapat dilihat pada **Tabel 6.1.** berikut ini:

Tabel 6.1.

**Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah
Provinsi Kalimantan Timur Tahun Periode 2024 sd 2026
Sub Tahap Rancangan**

Kode Perangkat Daerah : 5.06.5.07.0.00.05.0000
Nama Perangkat Daerah : Badan Penghubung Provinsi

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi	
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
Mewujudkan layanan publik pemerintahan yang berkualitas														
	Meningkatnya kualitas layanan publik Badan Penghubung Provinsi													
		5.07.02	PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG											
				Persentase Keluhan Pengguna Layanan Fasilitas Hubungan Antar Lembaga yang ditindaklanjuti	100 %	100 %	1.264.933.410,00	100 %	1.264.933.410,00	100 %	1.264.933.410,00	100 %	Badan Penghubung Provinsi	
				Persentase Keluhan Pengguna Layanan Fasilitas Promosi dan Informasi yang ditindaklanjuti	100 %	100 %	2.684.233.789,00	100 %	2.684.233.789,00	100 %	2.684.233.789,00	100 %	Badan Penghubung Provinsi	
				Persentase Keluhan Pengguna Layanan Mess yang ditindaklanjuti	100 %	100 %	986.376.200,00	100 %	894.536.200,00	100 %	1.078.216.200,00	100 %	Badan Penghubung Provinsi	
Mewujudkan birokrasi pemerintahan yang akuntabel														
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Badan Penghubung Provinsi													
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI											
				Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	82,5 Indeks	82,5 Indeks	17.564.456.601,00	83 Indeks	18.156.296.601,00	83,5 Indeks	18.472.616.601,00	83,5 Indeks	Badan Penghubung Provinsi	

Tabel 6.2.

Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Indikator Kinerja dan Pendanaan
Badan Penghubung Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Kinerja dan Program	Indikator Kinerja (outcome) dan (output)	Kondisi Kinerja Awal (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada akhir Periode Renstra		PD Penanggung Jawab	Lokasi
							Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp		
							Kinerja	Pagu (Rp)	Kinerja	Pagu (Rp)	Kinerja	Pagu (Rp)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Mewujudkan layanan publik pemerintahan yang berkualitas	Meningkatnya kualitas layanan publik Badan Penghubung Provinsi	Indeks Kepuasan terhadap Pelayanan Mess	05 07 02	PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG	Hasil : PERSENTASE KELUHAN PENGGUNA LAYANAN MESS YANG DITINDAKLANJUTI	100%	100	986,376,200	100	894,536,200	100	1,078,216,200	100	2,959,128,600	Badan Penghubung	DKI Jakarta
					Hasil : PERSENTASE KELUHAN PENGGUNA LAYANAN FASILITASI HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA YANG DITINDAKLANJUTI	100%	100	1,264,933,410	100	1,264,933,410	100	1,264,933,410	100	3,794,800,230		
		Indeks Kepuasan terhadap Pelayanan Fasilitasi Hubungan Antar Lembaga	05 07 02 1 01	Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	Keluaran : Persentase Pelayanan Penghubung yang Dilaksanakan	100%	100	4,935,543,399	100	4,843,703,399	100	5,027,383,399	100	14,806,630,197		
					Hasil : Terlaksananya Pelayanan Penghubung	100%	100		100		100					
		Indeks Kepuasan terhadap Pelayanan Fasilitasi Promosi dan Informasi	05 07 02 1 01 01	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat	Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat yang Ditingkatkan	2 Laporan	2	876,700,000	2	876,700,000	2	876,700,000	6	2,630,100,000		
					Hasil : Terlaksananya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat	2 Laporan	2		2		6					
		05 07 02 1 01 02	Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat	Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat	3 Laporan	3	824,844,410	3	824,844,410	3	824,844,410	9	2,474,533,230			
				Hasil : Terlaksananya Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat	3 Laporan	3		3		9						
		05 07 02 1 01 03	Peningkatan Fasilitasi Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya	Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya yang Ditingkatkan	17 Laporan	2	956,209,789	2	956,209,789	2	956,209,789	6	2,868,629,367			
				Hasil : Terlaksananya Peningkatan Fasilitasi Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya	17 Laporan	2		2		6						
		05 07 02 1 01 04	Kegiatan Fasilitasi Pameran Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya	Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Fasilitasi Pameran Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya	6 Laporan	3	1,728,024,000	3	1,728,024,000	3	1,728,024,000	9	5,184,072,000			
				Hasil : Terlaksananya Kegiatan Fasilitasi Pameran Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya	6 Laporan	3		3		9						
		05 07 02 1 01 05	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	4 Laporan	6	549,785,200	6	457,925,200	7	641,605,200	19	1,640,295,600			
				Hasil : Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	4 Laporan	6		6		7	19					
Mewujudkan birokrasi pemerintahan yang akuntabel	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Badan Penghubung Provinsi	Nilai Akuntabilitas Kinerja Badan Penghubung Provinsi	05 07 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Hasil : INDEKS KUALITAS LAYANAN KESEKRETARIATAN	82,5	82,5	17,564,456,601	83	18,156,296,601	83,5	18,472,616,601	83,5	54,193,369,803		
					05 07 01 1 01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Keluaran : Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang ditetapkan tepat waktu	100%	100	521,660,700	100	521,660,700	100	521,660,700	100	1,564,982,100
							Hasil : Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	100		100		100			
					05 07 01 1 01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9 Dokumen	9	166,187,400	9	166,187,400	9	166,187,400	27	498,562,200
Hasil : Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9 Dokumen	9		9		9										

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Kinerja dan Program	Indikator Kinerja (outcome) dan (output)	Kondisi Kinerja Awal (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada akhir Periode Renstra		PD Penanggung Jawab	Lokasi
							Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp		
							Kinerja	Pagu (Rp)	Kinerja	Pagu (Rp)	Kinerja	Pagu (Rp)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			05 07 01 1 01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Keluaran : Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Hasil : Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen 1 Dokumen	2 2	64,220,000	2	64,220,000	2	64,220,000	6	192,660,000		
			05 07 01 1 01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Keluaran : Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Hasil : Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen 1 Dokumen	2 2	64,220,000	2	64,220,000	2	64,220,000	6	192,660,000		
			05 07 01 1 01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Keluaran : Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD Hasil : Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen 1 Dokumen	2 2	55,220,000	2	55,220,000	2	55,220,000	6	165,660,000		
			05 07 01 1 01 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Keluaran : Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD Hasil : Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen 1 Dokumen	2 2	55,220,000	2	55,220,000	2	55,220,000	6	165,660,000		
			05 07 01 1 01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Keluaran : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Hasil : Tersedianya Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8 Laporan 8 Laporan	8 8	76,192,050	8	76,192,050	8	76,192,050	24	228,576,150		
			05 07 01 1 01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Keluaran : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Hasil : Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan 3 Laporan	8 8	40,401,250	8	40,401,250	8	40,401,250	24	121,203,750		
			05 07 01 1 02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Keluaran : Persentase ASN yang Mendapatkan Layanan Administrasi Keuangan Tepat Waktu Hasil : Terlaksananya Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100% 100%	100 100	3,549,097,700	100	3,549,097,700	100	3,549,097,700	100	10,647,293,100		
			05 07 01 1 02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Hasil : Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	22 Orang/Bulan 22 Orang/Bulan	25 25	2,985,137,700	25	2,985,137,700	25	2,985,137,700	25	8,895,413,100		
			05 07 01 1 02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Hasil : Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	61 Dokumen 61 Dokumen	24 24	237,960,000	24	237,960,000	24	237,960,000	72	713,880,000		
			05 07 01 1 02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Keluaran : Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Hasil : Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	149 Dokumen 149 Dokumen	149 149	180,000,000	149	180,000,000	149	180,000,000	447	540,000,000		
			05 07 01 1 02 06	Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan Hasil : Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	2 Dokumen 2 Dokumen	2 2	2,000,000	2	2,000,000	2	2,000,000	6	6,000,000		

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Kinerja dan Program	Indikator Kinerja (outcome) dan (output)	Kondisi Kinerja Awal (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada akhir Periode Renstra		PD Penanggung Jawab	Lokasi
							Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp		
							Kinerja	Pagu (Rp)	Kinerja	Pagu (Rp)	Kinerja	Pagu (Rp)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			05 07 01 1 02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran Hasil : Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Dokumen	13	92,000,000	13	92,000,000	13	92,000,000	39	278,000,000		
			05 07 01 1 02 08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Keluaran : Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Hasil : Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	4 Dokumen	4	72,000,000	4	72,000,000	4	72,000,000	12	216,000,000		
			05 07 01 1 03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Keluaran : Persentase Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang dilaksanakan Hasil : Terlaksananya Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100%	100	83,000,000	100	83,000,000	100	83,000,000	100	249,000,000		
			05 07 01 1 03 01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Keluaran : Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Hasil : Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	2	36,000,000	2	36,000,000	2	36,000,000	6	108,000,000		
			05 07 01 1 03 02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Keluaran : Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD Hasil : Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1	2,000,000	1	2,000,000	1	2,000,000	3	6,000,000		
			05 07 01 1 03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Keluaran : Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Hasil : Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	8 Laporan	8	45,000,000	8	45,000,000	8	45,000,000	24	135,000,000		
			05 07 01 1 05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Keluaran : Persentase SDM Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan Hasil : Meningkatnya Kompetensi ASN	76.24%	74.04	743,234,900	74.04	743,234,900	74.04	743,234,900	74.04	2,229,704,700		
			05 07 01 1 05 02	Pengadaan Pakaiannya Beserta Atribut Kelengkapannya	Keluaran : Jumlah Paket Pakaiannya Beserta Atribut Kelengkapannya Hasil : Tersedianya Pakaiannya Beserta Atribut Kelengkapannya	2 Paket	2	337,252,500	2	337,252,500	2	337,252,500	6	1,011,757,500		
			05 07 01 1 05 03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Keluaran : Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Hasil : Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	31 Dokumen	33	144,000,000	29	144,000,000	31	144,000,000	93	432,000,000		
			05 07 01 1 05 05	Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Keluaran : Jumlah Dokumen Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai Hasil : Terlaksananya Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	23 Dokumen	25	27,000,000	25	27,000,000	25	27,000,000	75	81,000,000		
			05 07 01 1 05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Keluaran : Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Hasil : Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	40 Orang	77	234,982,400	77	234,982,400	77	234,982,400	231	704,947,200		
			05 07 01 1 06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Keluaran : Persentase Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Dilaksanakan Hasil : Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100	1,557,983,901	100	1,650,449,975	100	1,507,269,975	100	4,715,703,851		

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Kinerja dan Program	Indikator Kinerja (outcome) dan (output)	Kondisi Kinerja Awal (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada akhir Periode Renstra		PD Penanggung Jawab	Lokasi
							Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp		
							Kinerja	Pagu (Rp)	Kinerja	Pagu (Rp)	Kinerja	Pagu (Rp)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			05 07 01 1 06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Hasil : Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 Paket	2	103,686,975	2	103,686,975	2	103,686,975	6	311,060,925		
			05 07 01 1 06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Hasil : Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	20 Paket	16	521,580,526	16	464,373,100	16	504,873,100	48	1,490,826,726		
			05 07 01 1 06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Hasil : Tersedianya Bahan Logistik Kantor	1 paket	2	88,200,000	2	88,200,000	2	88,200,000	6	264,600,000		
			05 07 01 1 06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan Hasil : Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	3 Paket	2	103,622,900	2	103,622,900	2	103,622,900	6	310,868,700		
			05 07 01 1 06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Hasil : Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	97 Laporan	56	649,053,500	57	706,887,000	57	706,887,000	170	2,062,827,500		
			05 07 01 1 06 11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Keluaran : Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Hasil : Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	1	91,840,000	1	183,680,000	0		2	275,520,000		
			05 07 01 1 07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Keluaran : Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Disediakan Hasil : Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100	965,509,500	100	3,276,060,026	100	1,611,401,436	100	5,852,970,962		
			05 07 01 1 07 01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Keluaran : Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan Hasil : Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	0 Unit	0	0	1	2,500,000,000	0	0	1	2,500,000,000		
			05 07 01 1 07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Keluaran : Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan Hasil : Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Operasional	0 Unit	1	35,000,000	0	0	0	0	1	35,000,000		
			05 07 01 1 07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan Hasil : Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	79 Unit	23	249,800,000	2	53,100,000	36	564,691,936	61	867,591,936		
			05 07 01 1 07 11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Keluaran : Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan Hasil : Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0 Unit	102	680,709,500	35	722,960,026	59	1,046,709,500	196	2,450,379,026		
			05 07 01 1 08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Keluaran : Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Dilaksanakan Hasil : Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100	5,890,793,600	100	5,894,093,600	100	5,897,723,600	100	17,682,610,800		
			05 07 01 1 08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Hasil : Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	2	11,560,000	2	11,560,000	2	11,560,000	6	34,680,000		

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Kinerja dan Program	Indikator Kinerja (outcome) dan (output)	Kondisi Kinerja Awal (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada akhir Periode Rencana	PD Penanggung Jawab	Lokasi
							Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
							Kinerja	Pagu (Rp)	Kinerja	Pagu (Rp)	Kinerja	Pagu (Rp)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
			06 07 01 1 08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disodikan Hasil : Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	48 Laporan	62	1.827.682.800	62	1.830.882.800	62	1.834.612.800	180	5.492.078.400	
			06 07 01 1 08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disodikan Hasil : Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	37 Laporan	37	4.051.650.800	37	4.051.650.800	37	4.051.650.800	111	12.154.962.400	
			06 07 01 1 00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Pemanjang Urusan Pemerintah Daerah	Keluaran : Perawatan Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi dengan baik Hasil : Terselenggaranya Barang Milik Daerah Perunjang Urusan Pemerintahan Daerah	88%	90	4.253.176.300	90	2.438.698.700	93	4.539.228.250	93	11.251.164.250	
			06 07 01 1 09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pagunya Hasil : Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	4 Unit	4	461.047.635	5	461.047.635	5	461.047.635	5	1.383.142.905	
			06 07 01 1 09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya Hasil : Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	39 Unit	43	744.804.478	44	744.804.478	44	744.804.478	44	2.234.413.434	
			06 07 01 1 00 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Hasil : Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	411 Unit	713	364.006.000	738	368.166.500	738	446.816.050	738	1.198.016.550	
			06 07 01 1 09 08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Keluaran : Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara Hasil : Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	5 Unit	5	110.538.750	6	110.538.750	7	110.538.750	7	331.616.250	
			06 07 01 1 00 00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Hasil : Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	5 Unit	11	2.601.686.437	11	646.119.337	11	2.716.022.377	11	6.890.016.151	
			06 07 01 1 09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Hasil : Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	20 Unit	20	78.000.000	20	78.000.000	20	78.000.000	20	234.000.000	
Total									22.506.606.000	23.060.060.800	23.500.090.000	65.090.060.000			

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator Kinerja Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Timur yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam 3 (tiga) tahun selama masa Renstra 2024-2026 sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD.

Indikator yang telah ditetapkan dengan mempertimbangkan dan menyelaraskan tujuan dan sasaran Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan dilatarbelakangi 3 (tiga) peran dan fungsi Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Timur, yakni sebagai “Pengendali Hubungan Antar Lembaga; Pengelola Anjungan Kaltim di TMII; dan Pengelola Mess Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur di Jakarta” yang ketiga peran dan fungsi tersebut bersifat Pelayanan Publik serta dalam rangka mengukur keberhasilan Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Timur dalam menjalankan perannya sebagai salah satu Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sesuai dengan tugas dan fungsinya, maka indikator kinerja tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 7.1.

Indikator Kinerja OPD Yang Mengacu Kepada Tujuan dan Sasaran RPD

NO	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPD	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD
		Tahun 0	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(9)
1	Indeks Kepuasan terhadap Pelayanan Mess	91,61	91,80	92,00	92,30	92,30
2	Indeks Kepuasan terhadap Pelayanan Fasilitasi Hubungan Antar Lembaga	86,87	87	88	90	90

3	Indeks Kepuasan terhadap Pelayanan Fasilitasi Promosi dan Informasi	96,84	95,00	96,00	96,50	96,50
4	Nilai Akuntabilitas Kinerja Badan Penghubung Provinsi	72,43	72,47	72,51	72,55	72,55

BAB VIII PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026 ini disusun berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru.

Renstra ini memuat Strategi, Kebijakan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Timur untuk mendukung pelaksanaan pembangunan Kalimantan Timur dan sebagai panduan bagi seluruh sub bagian/seksi di lingkungan Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Timur serta memberikan arah yang jelas dalam melaksanakan kegiatan sesuai posisi, tugas pokok, fungsi dan peran Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Timur sekaligus juga menjadi rambu-rambu untuk mengukur kinerja tahunan Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Timur berupa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Sesuai dengan perkembangan lingkungan internal dan eksternal yang terus mengalami perubahan, maka Renstra Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026 tidak bersifat kaku dan senantiasa harus memperhatikan perubahan-perubahan yang terjadi dan secara periodik dituangkan dalam *rolling plan* perumusan Renstra sehingga tujuan organisasi dapat tercapai.

Renstra ini dapat menjadi referensi dalam upaya meningkatkan kinerja Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Timur. Dalam rangka peningkatan

kapasitas, kerjasama dan loyalitas dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan wewenang yang diberikan, maka komitmen dari semua aparatur dalam pelaksanaannya sangat diharapkan, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat terwujud.

Dengan adanya Renstra Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Timur, maka penetapan prioritas pembangunan yang merupakan upaya untuk mendukung tercapainya tujuan dan sasaran RPD diharapkan akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis serta berkelanjutan dengan sesama perangkat daerah lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur maupun yang membidangi fungsi lainnya.

Jakarta, 17 Mei 2023

KEPALA BADAN



Raihan Fida Nuzband, S.Hut.

Pembina

NIP 19740704200701103

RENSTRA Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 disusun dengan mempedomani Peraturan Gubernur Nomor 16 tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026. RENSTRA Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 ini selanjutnya digunakan sebagai pedoman dan acuan bagi seluruh Kepala Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah tahunan guna mewujudkan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan.

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

ISRAN NOOR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,

NIP. 19690512 198903 2 009

LAMPIRAN

DEFINISI OPERASIONAL INDIKATOR

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN RENSTRA TAHUN 2024-2026

No	Uraian Indikator	Definisi Operasional	Formula
A	Program		
1	a. Persentase Keluhan Pengguna Layanan Mess yang Ditindaklanjuti b. Persentase Keluhan Pengguna Layanan Fasilitas Hubungan Antar Lembaga yang Ditindaklanjuti c. Persentase Keluhan Pengguna Layanan Fasilitas Promosi dan Informasi yang Ditindaklanjuti	Persentase keluhan pengguna layanan Badan Penghubung yang telah ditindaklanjuti berdasarkan hasil pengolahan data kuisioner beserta rekapitulasi keluhan/saran yang diberikan oleh pengguna layanan.	$\% \text{keluhan yang ditindaklanjuti} = \frac{\text{jumlah keluhan yang ditindaklanjuti}}{\text{jumlah seluruh keluhan}} * 100\%$ NB: Perhitungan berdasarkan masing-masing kuisioner
2	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	Terdiri atas 4 komponen antara lain : 1. Persentase dokumen perencanaan dan penganggaran yg ditetapkan tepat waktu (Bobot = 40%) 2. Persentase realisasi anggaran (Bobot = 30%) 3. Persentase SDM Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan (Bobot = 25%) 4. Persentase sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik (Bobot = 5%)	$\% \text{Komponen 1} = \frac{\text{jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran yg ditetapkan tepat waktu}}{\text{jumlah seluruh dokumen perencanaan dan penganggaran}} * 40\%$ $\% \text{Komponen 2} = \% \text{realisasi anggaran} * 30\%$ $\% \text{Komponen 3} = \frac{\text{Jumlah SDM yang mengikuti diklat}}{\text{Total SDM}} * 25\%$ $\% \text{Komponen 4} = \frac{\text{Jumlah sapras kantor kondisi baik}}{\text{Jumlah seluruh sapras}} * 5\%$

No	Uraian Indikator	Definisi Operasional	Formula
B	Kegiatan		
1	Persentase Pelayanan Penghubung yang dilaksanakan	Persentase pelaksanaan pelayanan penghubung	<p>%Pelayanan Penghubung yang dilaksanakan = Jumlah sub kegiatan yang dilaksanakan / Jumlah seluruh sub kegiatan * 100%</p> <p>NB: Sub kegiatan pada Kegiatan Pelaksanaan Pelayanan Penghubung</p>
2	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang ditetapkan tepat waktu	Cukup Jelas	%Dokumen yang ditetapkan tepat waktu = Jumlah dokumen yang ditetapkan tepat waktu / Jumlah seluruh dokumen yang disusun * 100%
3	Persentase ASN yang Mendapatkan Layanan Administrasi Keuangan Tepat Waktu	Cukup Jelas	%ASN yang mendapatkan layanan tepat waktu = Jumlah ASN yang mendapatkan layanan tepat waktu / Jumlah seluruh ASN * 100%
4	Persentase Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang dilaksanakan	Persentase pelaksanaan Kegiatan Administrasi BMD	<p>%kegiatan administrasi BMD yang dilaksanakan = Jumlah sub kegiatan yang dilaksanakan / Jumlah seluruh sub kegiatan * 100%</p> <p>NB: Sub kegiatan pada Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</p>

No	Uraian Indikator	Definisi Operasional	Formula
5	Persentase SDM Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Persentase Pegawai yang mengikuti diklat	$\% \text{Pegawai yang mengikuti diklat} = \frac{\text{Jumlah pegawai yang mengikuti diklat}}{\text{Jumlah seluruh pegawai}} * 100\%$
6	Persentase Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Dilaksanakan	Persentase pelaksanaan Kegiatan Administrasi Umum	$\% \text{kegiatan administrasi umum yang dilaksanakan} = \frac{\text{Jumlah sub kegiatan yang dilaksanakan}}{\text{Jumlah seluruh sub kegiatan}} * 100\%$ <p>NB: Sub Kegiatan pada Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</p>
7	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Disediakan	Persentase penyediaan BMD	$\% \text{BMD yang disediakan} = \frac{\text{Realisasi BMD yang telah disediakan}}{\text{Target BMD}} * 100\%$
8	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Dilaksanakan	Persentase pelaksanaan penyediaan jasa penunjang	$\% \text{penyediaan jasa penunjang yang dilaksanakan} = \frac{\text{jumlah penyediaan jasa penunjang yang telah dilaksanakan}}{\text{jumlah seluruh jasa penunjang yang akan dilaksanakan}} * 100\%$
9	Persentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi dengan baik	Persentase Sarana dan Prasarana Kantor yang berfungsi dengan baik sesuai Daftar Aset BMD	$\% \text{sapras yang berfungsi dengan baik} = \frac{\text{Jumlah sapras yang berfungsi dengan baik}}{\text{Jumlah seluruh sapras}} * 100\%$

No	Uraian Indikator	Definisi Operasional	Formula
C	Sub Kegiatan		
1	Jumlah Laporan Hasil Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat yang Ditingkatkan	Laporan Hasil Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat antara lain : <ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan hasil survey kepuasan masyarakat (SKM) terhadap pelayanan 2. Laporan Standar Operasional pelayanan 	Cukup Jelas
2	Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat	Laporan Hasil Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat antara lain : <ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan Kegiatan bersama Masyarakat 2. Laporan Pelayanan Kelembagaan 3. Laporan SKM 	Cukup Jelas
3	Jumlah Laporan Hasil Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya yang Ditingkatkan	Laporan Hasil Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya antara lain : <ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan kegiatan rutin Promosi Seni Budaya yang dilaksanakan di Anjungan Kaltim dan kegiatan-kegiatan sesuai <i>calender event</i> Taman Mini Indonesia Indah 2. Laporan peningkatan Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya yang dilaksanakan di Anjungan Kaltim berupa kegiatan-kegiatan seperti <i>cullinary festival</i>, <i>borneo festival</i>, <i>workshow</i> budaya dan kegiatan lainnya 	Cukup Jelas

No	Uraian Indikator	Definisi Operasional	Formula
4	Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Fasilitasi Pameran Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya	Laporan Hasil Kegiatan Fasilitasi Pameran Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya antara lain : <ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan Fasilitasi Pameran produk unggulan dan pelestarian Seni Budaya yang dilaksanakan di Jabodetabek 2. Laporan Fasilitasi Pameran produk unggulan dan pelestarian Seni Budaya yang dilaksanakan di luar daerah 3. Laporan hasil survey kepuasan masyarakat (SKM) pada kegiatan fasilitasi pameran produk unggulan dan pelestarian seni budaya 	Cukup Jelas
5	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung antara lain : <ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan SKM 2. Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi 3. Laporan Dokumentasi Kegiatan 4. Laporan Evaluasi Kegiatan 	Cukup Jelas
6	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah antara lain : <ol style="list-style-type: none"> 1. Renstra 2. Renja/RKT 3. PK 4. Rencana Aksi 5. IKU 6. IKI 7. Budaya Kerja 8. SOP 9. Anjab/ABK 	Cukup Jelas

No	Uraian Indikator	Definisi Operasional	Formula
7	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD antara lain : <ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen RKA-SKPD 2. Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 	Cukup Jelas
8	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD antara lain : <ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen Perubahan RKA-SKPD 2. Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 	Cukup Jelas
9	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD antara lain : <ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen DPA-SKPD 2. Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 	Cukup Jelas
10	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD antara lain : <ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen Perubahan DPA-SKPD 2. Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 	Cukup Jelas

No	Uraian Indikator	Definisi Operasional	Formula
11	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD antara lain : <ol style="list-style-type: none"> 1. LKjIP 2. Laporan Hasil Rapat Tindak Lanjut Evaluasi LKjIP 3. Monitoring dan Evaluasi Rencana Aksi per triwulan 4. Rekapitulasi Kuisisioner per semester 	Cukup Jelas
12	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah antara lain : <ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi SAKIP per triwulan (e-sakip) 2. Evaluasi dokumen perencanaan per triwulan (evdoren) 	Cukup Jelas
13	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah PNS	Cukup Jelas
14	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN antara lain : <ol style="list-style-type: none"> 1. Honorarium Pengelola Keuangan per bulan 2. Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa per bulan 	Cukup Jelas

No	Uraian Indikator	Definisi Operasional	Formula
15	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD antara lain : <ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen LS Belanja Rutin (listrik, air, telepon, internet, tunjangan ASN, jasa tenaga teknis/non teknis, iuran BPJS Kesehatan dan ketenagakerjaan) per bulan 2. Dokumen GU Belanja Operasional dan Modal per bulan 3. Dokumen LS Pengadaan B/J 	Cukup Jelas
16	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan antara lain : <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemeriksaan Operasional 2. Pemeriksaan Pengadaan Barang/Jasa 	Cukup Jelas
17	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD antara lain : <ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan Rekonsiliasi Belanja Operasi per bulan 2. Laporan Keuangan 	Cukup Jelas
18	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Laporan realisasi anggaran per triwulan beserta target realisasi triwulan berikutnya	Cukup Jelas
19	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	<ol style="list-style-type: none"> 1. RKBMD 2. RKPBMMD 	Cukup Jelas
20	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen Pengamanan BMD	Cukup Jelas

No	Uraian Indikator	Definisi Operasional	Formula
21	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan Penatausahaan BMD : 1. Laporan atas belanja barang persediaan dan pemeliharaan (SIKAP) per triwulan 2. Laporan atas belanja modal (Simda BMD) per triwulan	Cukup Jelas
22	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1. Pakaian Dinas Harian (PDH)/Batik 2. Pakaian Olahraga	Cukup Jelas
23	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian antara lain: 1. SKP 2. KGB 3. Usulan Diklat 4. Usulan Pensiun	Cukup Jelas
24	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen SKP sampai dengan PPK masing-masing PNS	Cukup Jelas
25	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Pegawai yang mengikuti diklat	Cukup Jelas
26	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Nama paket sesuai dengan RKA dan DPA	Cukup Jelas
27	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Nama paket sesuai dengan RKA dan DPA	Cukup Jelas
28	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1. Natura (Air mineral) 2. Makanan dan Minuman Rapat	Cukup Jelas
29	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Nama paket sesuai dengan RKA dan DPA	Cukup Jelas
30	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1. Laporan-laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi 2. Laporan kegiatan Forum Renja	Cukup Jelas
31	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (E-Billing)	Cukup Jelas

No	Uraian Indikator	Definisi Operasional	Formula
32	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Kendaraan dinas Gubernur/Wagub/ Sekda	Cukup Jelas
33	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Kendaraan dinas operasional/ lapangan	Cukup Jelas
34	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Peralatan dan mesin lainnya sesuai dengan RKA dan DPA	Cukup Jelas
35	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya sesuai dengan RKA dan DPA	Cukup Jelas
36	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1. Materai 2. Jasa Pengiriman	Cukup Jelas
37	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1. Telepon 2. Internet 3. Air 4. Listrik 5. Video Conference berlangganan 6. Hosting Website 7. Instalasi Internet	Cukup Jelas
38	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	1. Jasa Tenaga Teknis/Non Teknis 2. Iuran BPJS Kesehatan 3. Iuran BPJS Ketenagakerjaan	Cukup Jelas
39	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Kendaraan dinas Gubernur/Wagub/ Sekda yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Cukup Jelas
40	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kendaraan dinas operasional/ lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Cukup Jelas

No	Uraian Indikator	Definisi Operasional	Formula
41	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara sesuai Daftar Aset BMD	Cukup Jelas
42	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	Aset Tak Berwujud yang Dipelihara antara lain : <ol style="list-style-type: none"> 1. Background Changing 2. Costume Reality 3. Multimedia Anjungan 4. Website 5. Virtual Reality 	Cukup Jelas
43	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi antara lain : <ol style="list-style-type: none"> 1. Gedung Kantor dan Mess Jl. Kramat II No.42 Jakarta 2. Gedung Mess Jl. Kramat II No.34 Jakarta 3. Rumah Dinas 4. Bangunan Anjungan (8 Bangunan) 	Cukup Jelas
44	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/ rehabilitasi	Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/rehabilitasi sesuai Daftar Aset BMD	Cukup Jelas